



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENGARUH PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN  
TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**EDI SETIAWAN**

**NIM. 015977482**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2012**

## PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister ini dengan judul : “**Pengaruh Program Aksi Desa Mandiri Pangan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Oktober 2012

yang menyatakan,



**EDI SETIAWAN**  
NIM. 015977482

**ABSTRACT****VILLAGE INDEPENDENT ACTION PROGRAM EFFECT OF FOOD ON  
HOUSEHOLD INCOME POOR**

EDI SETIAWAN

UNIVERSITAS TERBUKA

edise\_78@yahoo.com

**Keywords:** *food, poor households*

Purpose of this research is to investigate the effect is empowerment, food security system development and integration of cross-sectoral programs in the program of action independent village food to the income of poor households in the province of Bangka Belitung. The experiment was conducted in all the villages of the action program beneficiaries Mandiri Rural Food Food Security Agency (BKP) Islands Province Pacific Islands in 2006, amounting to 8 villages.

Total population research as KK 2049. The sample was selected using non-probability sampling technique with quota sampling of 102 families who are members of affinity groups. The method of analysis was conducted descriptive analysis and linear regression analysis.

The conclusion of this study is that there is the influence of variables together empowerment, food security system development and integration of cross-sectoral programs to increase the income of poor households in the action program of food self-sufficient village Islands Province Pacific Islands. The regression equation between variables is  $Y = -0.090 + 0.128 X1 + 0.109 X2 - 0.087 X3$  with a coefficient of determination equal to 79.10%. Community empowerment is a dominant variable affecting the income of poor households. Increased household income beneficiaries of the program of action of food self-sufficient villages in the province of Bangka Belitung very determined how far community empowerment activities undertaken, and vice versa weak empowerment will decrease the income of poor households.

**ABSTRAK****PENGARUH PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN TERHADAP  
PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN**

EDI SETIAWAN

UNIVERSITAS TERBUKA

edise\_78@yahoo.com

**Kata kunci : pangan, rumah tangga miskin**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral dalam program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian dilaksanakan di seluruh desa penerima manfaat program aksi Desa Mandiri Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 yang berjumlah 8 desa.

Jumlah populasi penelitian sebanyak 2049 KK. Sampel dipilih menggunakan tehnik *non probability sampling* dengan sampling kuota sebesar 102 KK yang tergabung dalam kelompok afinitas. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier.

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persamaan regresi antar variabel adalah  $Y = -0,090 + 0,128 X_1 + 0,109 X_2 - 0,087 X_3$  dengan nilai koefisien determinasi sebesar 79,10%. Pemberdayaan masyarakat merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin penerima manfaat program aksi desa mandiri pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat ditentukan seberapa jauh kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, demikian pula sebaliknya lemahnya pemberdayaan masyarakat akan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan rumah tangga miskin.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

Judul Tesis : Pengaruh Program Aksi Desa Mandiri Pangan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

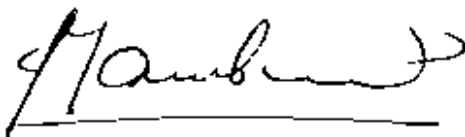
Nama : EDI SETIAWAN

NIM : 015977482

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minut Administrasi Publik

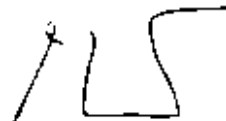
Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Rudi P. Tambunan

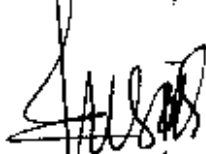
Pembimbing II,



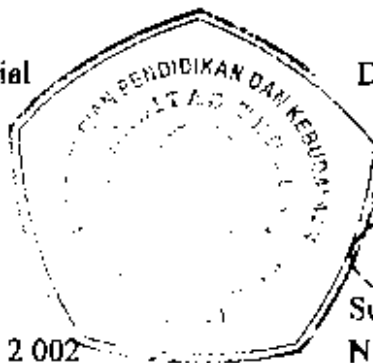
Dr. Effendi Wahyono, M. Hum

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Dra. Susanti, M.Si  
NIP. 19671214 199303 2 002



Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc. Ph.D  
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : EDI SETLAWAN  
NIM : 015977482  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minal  
Administrasi Publik  
Judul Tesis : Pengaruh Program Aksi Desa Mandiri Pangan  
terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program  
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/tanggal : Sabtu, 15 Desember 2012  
Waktu : Pukul 08.00 – 10.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Nama :  Dr. Liestyodono B.I., M.Si

Penguji Ahli

Nama :  Prof. Dr. Ki Agus M. Sobri, M.Si

Pembimbing I

Nama :  Dr. Rudi P. Tambunan

Pembimbing II

Nama :  Dr. Effendi Wahyono, M. Hum

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, pujian yang mengawali segenap kebahagiaan atas terselesaikannya kewajiban akademik penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini terlebih dengan waktu yang relatif normal. Tesis yang berjudul “PENGARUH PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG” merupakan karya ilmiah yang dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Banyak dinamika yang dilalui selama penulis menyusun karya ini. Setidaknya tantangan dan masalah yang dihadapi bisa terobati dengan adanya uluran tangan dari semua pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan rasa tulus penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta (H. Muhammad Amin, SH dan Hj. Siti Misbah) dan Bapak/Ibu Mertua (Drs. A. Syafran Hoyor dan Yuliana) beserta keluarga besar yang ikut mendo'akan demi suksesnya penyelesaian tesis ini. Khusus kepada Istri (Silvia Mustika) dan Anak-anak tercinta (Muhammad Iqro' Attaturk, Muhammad Isro' Attaturk dan Afruva Qultum Baskenti), penulis menyampaikan terimakasih atas pengorbanannya selama ini, tiada henti-hentinya memotivasi dan ikut larut dalam kesibukan menyelesaikan studi ini. Selanjutnya di antara mereka yang paling berjasa terhadap lahirnya karya ini, penghargaan yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :



1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.  
Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menimba ilmu di kampus “rakyat”.
2. Suciati, M.Sc., Ph.D., Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.  
Terima kasih atas segala bantuannya untuk menunjang penyelesaian perkuliahan dan tugas akademik ini.
3. Dra. Susanti, M.Si., Ketua Bidang Magister Ilmu Administrasi. Terima kasih atas bantuan dan dukungan administratif dalam penyelesaian studi ini.
4. Drs. Syarif Fadillah, M.Si., Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pangkalpinang beserta staf. Terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis termasuk suasana kekeluargaan, ketenangan dan kedamaian dalam proses penyelesaian TAPM.
5. Dr. Rudi P. Tambunan, selaku Pembimbing I beserta keluarga. Tidak ada kata yang pantas penulis sampaikan selain ucapan terima kasih atas segala kesabaran dan pemikirannya dalam mendampingi penulis selama proses penyelesaian tugas akademik ini.
6. Dr. Effendi Wahyono, M.Hum., selaku Pembimbing II beserta keluarga.  
Terima kasih atas bimbingannya dalam penyelesaiannya tugas akhir ini.
7. Bapak-bapak Panitia Penguji TAPM, terima kasih atas segala saran dan masukannya dalam penyempurnaan karya ini.



8. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka yang telah tekun mendharmabaktikan ilmunya kepada segenap mahasiswa termasuk penulis.
9. Seluruh responden beserta informan yang penulis anggap sebagai bagian dari “napas” terbentuknya karya ini. Terima kasih atas kerelaan dan partisipasinya.
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toni, SE. dan Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. H. Salim Ridwanto, MM. (am), terimakasih atas dukungannya dalam setiap aktifitas penulis. Selanjutnya kawan-kawan Abdi Negara di Kantor Badan Ketahanan Pangan, Ibu Puput, Mas Dody, Pak Cik Amit, Bung Rahadian, Armil, Ongky, Lely dan kawan-kawan lainnya yang banyak memberikan perhatian untuk studi dan pekerjaan.
11. Kepada semua yang tidak penulis sebutkan di sini, terima kasih atas iringan do'a dan bantuannya.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Hal itu semata-mata karena kekhilafan penulis. Mudah-mudahan kebaikan selalu datang dari segala penjuru, termasuk kebaikan dalam mengkritik dan memperbaiki karya ini. Semoga kehadiran karya ini tidak membawa beban bagi semuanya, melainkan memberikan rahmat bagi semesta alam. *Amin yaa Robbal Aalamiin.*

Pangkalpinang, Oktober 2012

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
ABSTRACT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM .....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A..... Latar belakang.....	1
B..... Rumusan masalah.....	9
C..... Tujuan penelitian .....	10
D..... Manfaat penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	11
B. Kerangka Berpikir .....	45
C. Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain penelitian .....	47
B. Populasi .....	48
C. Instrumen penelitian .....	49
D. Prosedur pengumpulan data .....	50
F. Metode analisis data .....	52
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran umum obyek penelitian .....	57
B. Uji instrumen .....	68
C. Temuan penelitian .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 2.1 Jenjang enam metode analisis kebijakan .....	13
2. Gambar 2.2 Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan .....	14
3. Gambar 2.3 Proses analisis kebijakan publik .....	14
4. Gambar 2.4 Skema kerangka berpikir .....	44
5. Gambar 3.1 Peta lokasi, populasi dan sampel penelitian .....	49
6. Gambar 4.1 Normalitas .....	87

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1 Jumlah lokasi dan KK Miskin Desa Mapan 2006-2008 .....	20
2.	Tabel 2.2 Jumlah KK Miskin Desa Mapan tahun 2006 .....	21
3.	Tabel 3.1 Jumlah sampel penelitian .....	48
4.	Tabel 3.2 Variabel dan indikator penelitian .....	50
5.	Tabel 4.1 Produksi bersih sereal 2008-2010 Kep. Bangka Belitung..	59
6.	Tabel 4.2 Jenis kelamin dan umur responden.....	65
7.	Tabel 4.3 Status pernikahan dan jumlah anggota keluarga .....	65
8.	Tabel 4.4 Rekapitulasi nilai r untuk uji validitas instrumen penelitian variabel pemberdayaan masyarakat (X <sub>1</sub> ) .....	69
9.	Tabel 4.5 Rekapitulasi nilai r untuk uji validitas instrumen penelitian variabel pengembangan sistem ketahanan pangan (X <sub>2</sub> ).....	70
10.	Tabel 4.6 Rekapitulasi nilai r untuk uji validitas instrumen penelitian variabel integrasi program lintas sektor (X <sub>3</sub> ) .....	71
11.	Tabel 4.7 Rekapitulasi nilai r untuk uji validitas instrumen penelitian variabel pendapatan (Y).....	71
12.	Tabel 4.8 Koefisien reabilitas .....	72
13.	Tabel 4.9 Distribusi frekuensi tanggapan responden tentang pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan .....	74
14.	Tabel 4.10 Distribusi frekuensi tanggapan responden tentang pengaruh variabel sistem ketahanan pangan terhadap pendapatan .....	80
15.	Tabel 4.11 Distribusi frekuensi tanggapan responden tentang pengaruh variabel sistem ketahanan pangan terhadap pendapatan .....	84
16.	Tabel 4.12 Model summary <sup>b</sup> .....	88
17.	Tabel 4.13 Nilai koefisien .....	89
18.	Tabel 4.14 Nilai koefisien .....	91
19.	Tabel 4.15 Nilai koefisien .....	92

20.	Tabel 4.16 Nilai koefisien .....	94
21.	Tabel 4.17 Nilai F hitung variabel $X_1$ , $X_2$ dan $X_3$ terhadap Y .....	97
22.	Tabel 4.18 Nilai T hitung variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ) .....	98
23.	Tabel 4.19 Nilai T hitung variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) .....	100
24.	Tabel 4.20 T hitung variabel integrasi program lintas sektor ( $X_3$ ) .....	101
25.	Tabel 4.21. Model summary <sup>b</sup> .....	102
26.	Tabel 4.22. Variasi pendapatan rumah tangga miskin.....	103

UNIVERSITAS TERBUKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Indonesia semakin kompleks. Hal ini tercermin dari semakin bertambahnya jumlah penduduk, terbatasnya sumberdaya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, minimnya sarana dan prasarana usaha di bidang pertanian, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Kondisi faktual ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dihadapkan dengan masalah dan tantangan yang lebih spesifik. Kerusakan lingkungan oleh kegiatan penambangan rakyat yang tidak terkendali mengakibatkan rusaknya bentang alam di lokasi penambangan seperti adanya kolong, menurunnya permukaan air tanah, lahan menjadi tidak subur, terganggunya ekosistem dan lain-lain. Semakin berkembangnya tambang rakyat dan meningkatnya harga timah, menyebabkan peralihan tenaga kerja di bidang pertanian ke bidang usaha pertambangan rakyat. Akibatnya lahan produktif dan produksi pertanian secara umum menurun seperti lada, padi, palawija, sayuran dan ternak.



Ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat tergantung adanya pasokan bahan pokok dari luar daerah seperti beras, gula, minyak goreng, sayur-sayuran. Pada tahun 2008, kemampuan produksi pangan (beras) hanya mencapai 8,14% atau sebesar 8.782,78 ton pertahun, angka yang jauh dibanding kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 107.961,74 ton per tahun. Dengan demikian kekurangan pangan yang harus didatangkan dari luar daerah sebanyak 99.178,96 ton dalam setahun atau ketergantungannya sebesar 91,86%.

Selain itu dari aspek distribusi pangan, daerah ini sangat rentan untuk terjadinya gangguan dan hambatan yang salah satunya dikarenakan kondisi daerah dalam gugusan kepulauan. Faktor yakni cuaca yang tidak begitu baik, padatnya arus distribusi pada saat hari besar keagamaan, kapasitas bongkar muat pelabuhan yang padat, tingginya biaya transportasi untuk distribusi serta tingginya biaya bongkar muat di pelabuhan. Kemudian dalam aspek konsumsi dan keamanan pangan, kualitas dan kuantitas pangan penduduk daerah ini juga masih rendah. Hal ini terlihat dari pola konsumsi pangan yang masih belum beragam dan bergizi seimbang (didominasi oleh sumber karbohidrat beras dan sumber protein nabati). Pada tahun 2008, konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi yaitu sekitar 111,84 kg/kapita/tahun. Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumber daya yang semakin ketat termasuk dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini berdampak pada pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang bertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal).

Ketiga dimensi ketahanan pangan tersebut (aspek ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan/konsumsi pangan) menjadi masalah serius ketika dikaitkan dengan



upaya pencapaian ketahanan pangan rumah tangga dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan. Kesejahteraan rumah tangga sangat terpaut dengan kondisi ketahanan pangan. Semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin baik pula tingkat ketahanan pangan rumah tangga tersebut. Untuk menuju pencapaian ketahanan pangan nasional, secara nyata harus diawali dengan ketahanan pangan rumah tangga termasuk individu dalam lingkup terkecil.

Menurut Simatupang (2007), ketahanan pangan nasional merupakan syarat keharusan namun tidak cukup untuk menjamin ketahanan pangan seluruh provinsi. Ketahanan pangan provinsi juga merupakan syarat keharusan namun tidak cukup untuk menjamin ketahanan pangan seluruh kabupaten, desa dan rumah tangga di provinsi tersebut. Selanjutnya ketahanan pangan keluarga merupakan syarat keharusan namun tidak menjamin ketahanan pangan seluruh individu keluarga. Ketahanan pangan seluruh individu merupakan syarat keharusan dan kecukupan bagi terjaminnya ketahanan pangan suatu negara.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lainnya. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab akibat dari kemiskinan. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan (Krisnamurti, 2003).

Jumlah penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia sekarang memerlukan upaya pemberdayaan yang intensif agar mereka mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Berdasarkan data BPS tahun 2008, persentase penduduk miskin sebanyak 14,42% atau sekitar 34,96 juta jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 228,5 juta jiwa. Berdasarkan penyebarannya, jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 63,47%, lebih besar dari perkotaan 36,53%. Sedangkan persentase penduduk hidup dibawah garis kemiskinan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data BPS tahun 2007 diluar Kota Pangkalpinang adalah sekitar 10,36% yang meliputi Kabupaten Bangka (10,53%), Bangka Barat (7,41%), Bangka Tengah (10,36), Bangka Selatan (6,71%), Belitung (11,59%) dan Belitung Timur (15,58%).

Konsentrasi penduduk miskin biasanya berada di daerah marjinal, yang memberikan kontribusi terhadap rusaknya sumber daya alam, karena mereka tidak mempunyai alternatif lain yang lebih baik. Kelompok ini selain memiliki daya beli yang rendah pada umumnya masih diliputi masalah rendahnya pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran dalam memilih, mengolah dan mengkonsumsi makanan yang bergizi bagi anggota keluarganya. Kondisi ini memberikan kontribusi pada terhambatnya peningkatan status gizi tingkat rumah tangga (BKP Deptan, 2005).

Kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, membutuhkan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Secara nasional, setelah dikeluarkannya UU no 7 tahun 1996, ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan seluruh penduduk serta menjadi bagian yang terpenting bagi ketahanan



nasional. Dalam UU itu, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai bagian integral dalam pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan tingkat rumah tangga miskin menjadi salah satu dasar Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menterjemahkan kebijakan ketahanan pangan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN). Pengembangan DEMAPAN merupakan replikasi dan adaptasi dari kegiatan *Participatory Development in Rain-fed Areas* (PIDRA) dan *Special Program for Food Security* (SPFS), yang telah dinilai oleh lembaga internasional (IFAD dan FAO) berhasil dalam memberdayakan masyarakat miskin di daerah lahan kering dan di berbagai zona agroekosistem, dan langsung menyentuh masyarakat miskin di daerah rawan pangan. Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2007 – 2012 Badan Ketahanan Pangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program peningkatan kesejahteraan petani adalah pengembangan Desa Mandiri Pangan. Sasaran program ini adalah meningkatnya kemandirian pangan masyarakat melalui proses pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatannya.

Kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung khususnya aspek pendapatan tercermin dari Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Bank Indonesia Palembang pada triwulan II 2011 yang mencatat setidaknya ada dua pengukuran yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Survei yang dilakukan secara bulanan tersebut melibatkan 200 responden setiap bulannya dari berbagai

kalangan pendidikan dan pekerjaan di Kota Pangkalpinang. Mayoritas responden yakni sebesar 57,83% menyatakan bahwa penghasilan mereka pada periode pengukuran relatif sama dibandingkan kondisi enam bulan sebelumnya. Sementara sebanyak 37,17% responden berpendapat bahwa penghasilannya lebih baik dibandingkan enam bulan sebelumnya. Sebagian besar responden (50,67%) berpendapat penghasilan enam bulan yang akan datang relatif sama. Sementara itu cukup banyak juga responden yang menyatakan akan lebih baik, yaitu sebesar 44,83%. Hal ini terkait masih cukup tingginya harga komoditas unggulan seperti timah, kelapa sawit, karet, dan lada meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya (Bank Indonesia, 2008).

Indeks nilai tukar petani (NTP) di Bangka Belitung pada triwulan II 2011 sedikit naik dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani sedikit meningkat. Kenaikan pendapatan yang diterima petani masih lebih besar dibanding peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Peningkatan NTP ini juga didukung dengan menurunnya inflasi tahunan pedesaan dari 7,94% (yoy) di triwulan I menjadi 7,59% (yoy). Berdasarkan sektornya, NTP perkebunan merupakan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, di samping itu NTP perkebunan satu-satunya yang nilainya berada di atas 100. Hal ini memperlihatkan bahwa petani di bidang perkebunan merupakan yang paling sejahtera dibanding yang lain. Selain itu NTP sektor perkebunan pada triwulan II ini juga mengalami peningkatan terkait dengan masih tingginya harga lada, kelapa sawit, dan karet.

Kondisi perbaikan pendapatan ini sangat tergantung dari fluktuasi harga komoditas perkebunan dan hasil tambang (timah). Menurunnya harga timah di



pasar dunia berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat Bangka Belitung karena komoditi ini masih menjadi penyokong kuat perekonomian daerah (tribunnews.com, 2/7/2011). Di sisi lain timah semakin sulit dicari sehingga pendapatan masyarakatpun sedikit berkurang (Bangka Post, 26/9/2010). Kemudian Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menyatakan keprihatinannya dengan harga karet yang terus menurun drastis mencapai kisaran Rp 3.000 per kg. Harga tersebut tentunya akan menyebabkan perekonomian petani menjadi terganggu. Kondisi tersebut membuat sejumlah petani karet semakin menderita lantaran penghasilan yang mereka dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bangka Post, 14/6/2012).

Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai dilaksanakan tahun 2006 sampai sekarang. Sasaran program ini adalah desa yang penduduknya >30% KK miskin disamping memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang belum dikembangkan, serta adanya respon dari aparat desa dan masyarakat terhadap pembangunan ketahanan pangan. Sebaran lokasi/desa program DEMAPAN di wilayah ini untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 27 Desa yang berada di Kabupaten Belitung (Desa Gunung Riting, Simpang Rusa, Membalong, Terong dan Kembiri), Kabupaten Bangka (Desa Labu, Air Buluh, Riding panjang, Berbura, Mangka, dan Labuh Air Pandan), Kabupaten Bangka Selatan (Desa Panca Tunggal, Fajar Indah, Simpang Rimba, Gudang, Kumbang dan Sumber jaya Permai), Kota Pangkalpinang (Kelurahan Tuatunu, Sriwijaya, Bacang, Paritlalang, Selindung dan Air Itam), dan Kabupaten Bangka Tengah (Desa Baskara Bakti, tanjung Pura dan Kulur Ilir).

Jumlah KK miskin secara keseluruhan untuk desa sasaran program tersebut adalah sekitar 7192 KK miskin, yang diantaranya dibentuk dalam kelompok-kelompok afinitas.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak program tersebut terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin. Tujuan yang ingin dicapai dari program aksi ini terhadap rumah tangga miskin adalah sesuai dengan indikator tahap kemandirian yakni meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketersediaan dan distribusi pangan, berkembangnya usaha yang mapan, mantapnya organisasi kelembagaan, terbentuknya jaringan usaha, serta menurunnya prevelensi kelaparan, wabah penyakit dan gizi buruk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan dalam meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin dalam pencapaian ketahanan pangannya. Namun mengingat tujuan yang ingin dicapai sangat luas, maka penelitian ini berusaha mengidentifikasi keberhasilan program dengan menggunakan variabel pendapatan rumah tangga miskin. Asumsinya dengan peningkatan pendapatan, rumah tangga miskin dapat meningkatkan ketersediaan pangan, memiliki akses pangan baik dan tingkat konsumsi pangan yang sesuai dengan standar yang dianjurkan sehingga tercapai ketahanan pangan rumah tangga yang berkelanjutan termasuk menurunnya prevelensi kelaparan, wabah penyakit dan gizi buruk sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian saya mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Aksi Desa Mandiri Pangan terhadap pendapatan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, sesungguhnya kebijakan ketahanan pangan nasional melalui program aksi desa mandiri pangan secara konseptual sudah dapat mengakomodasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat penerima manfaat program (rumah tangga miskin). Pendekatan pemberdayaan yang dikembangkan melalui program ini dapat mendorong pengembangan masyarakat pedesaan dalam peningkatan tingkat penghidupan dan pola pikir rumah tangga miskin.

Kondisi faktual masyarakat miskin penerima manfaat program tersebut masih dihadapkan permasalahan yang sangat kompleks. Selain faktor penguasaan sumber daya yang terbatas (kemampuan SDM, permodalan, aset dan lainnya), juga pelaksanaan pendekatan pemberdayaan yang dikembangkan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal seperti peran penyuluh pendamping program, aparat pelaksana program tingkat provinsi dan kabupaten serta kelembagaan lainnya yang dibentuk sebagai pendorong percepatan pemberdayaan masyarakat miskin seperti Tim Pangan Desa (TPD).

Kesenjangan antara kondisi ideal kebijakan ketahanan pangan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan dengan kondisi faktual yang dirasakan oleh rumah tangga miskin selaku penerima manfaat program dapat dirumuskan masalah yakni : Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral dalam program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral dalam program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun teoritis. Manfaat praktis dapat digunakan oleh instansi terkait dan masyarakat penerima manfaat program. Sementara manfaat teoritis dapat dijadikan panduan bagi peneliti dan komunitas ilmiah. Manfaat praktis dan teoritis dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Manfaat praktis**

1. Sebagai bahan masukan dalam perencanaan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sebagai salah satu dasar acuan bagi kelompok afinitas (kelompok rumah tangga miskin) penerima manfaat program aksi desa mandiri pangan dalam pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha kelompok.

#### **b. Manfaat teoritis**

1. Sebagai bahan referensi bagi peneliti di bidang ketahanan pangan.
2. Sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan kebijakan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian kebijakan publik

Dye (dalam Kismartini, 2010: 1.6) mengemukakan kebijakan publik sebagai “.... apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Senada dengan pandangan Dye adalah Edwards III dan Sharkansky (dalam Kismartini, 2010: 1.6) yang menjelaskan bawah kebijakan publik adalah :

*“....apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statment yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”.*

Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah sementara pihak-pihak lain hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Anderson (dalam Kismartini, 2010: 1.7) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal yang lebih tegas disampaikan David Easton yang mengatakan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Menurut Dye, kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam kebijakan publik disebabkan tiga hal yakni :

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

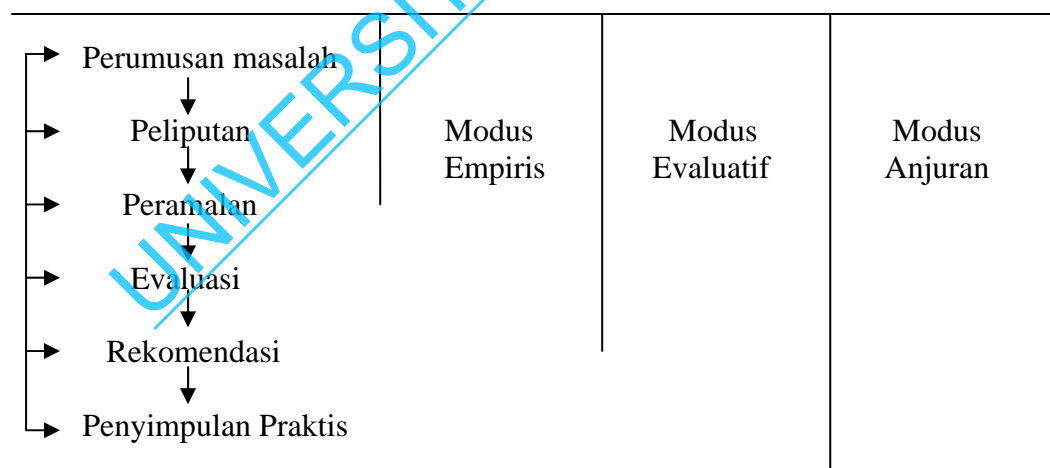
## **2. Analisis kebijakan publik**

Analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Analisis kebijakan publik merupakan cara mengawinkan informasi untuk mengambil alternatif-alternatif yang tersedia beberapa pilihan yang dinyatakan dalam istilah yang dapat diperbandingkan (*comparabel*), diprediksi secara kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan keputusan-keputusan kebijaksanaan. Secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi, sebaliknya penelitian kebijakan berarti semua studi yang menggunakan berbagai metodologi ilmiah untuk menjelaskan gejala dan/atau menentukan hubungan diantara gejala-gejala tersebut (Dunn, 1995).

Sedangkan menurut E.S. Quade (dalam Dunn 1995), analisis kebijakan adalah jenis analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijaksanaan didalam menguji pendapat-pendapat mereka. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum yang menunjukkan penggunaan intuisi dan pertimbangan dan mencakup tidak hanya pengujian kebijaksanaan dengan pemecahan kedalam komponen-komponennya tetapi juga merencanakan dan mencari sitesis atas alternatif-alternatif yang baru.

Dalam analisis kebijakan publik menggunakan metode analisis yang dimulai dengan perumusan masalah sampai dengan penyimpulan praktis (Dunn, 1995). Metode kebijaksanaan terlihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.1. Jenjang enam metode analisis kebijakan

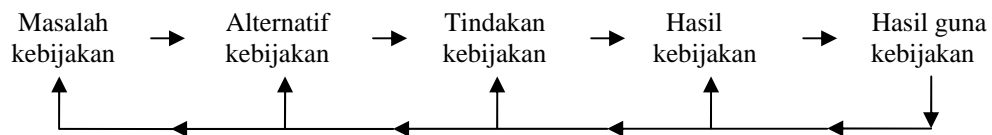


Sumber: Dunn, 1995

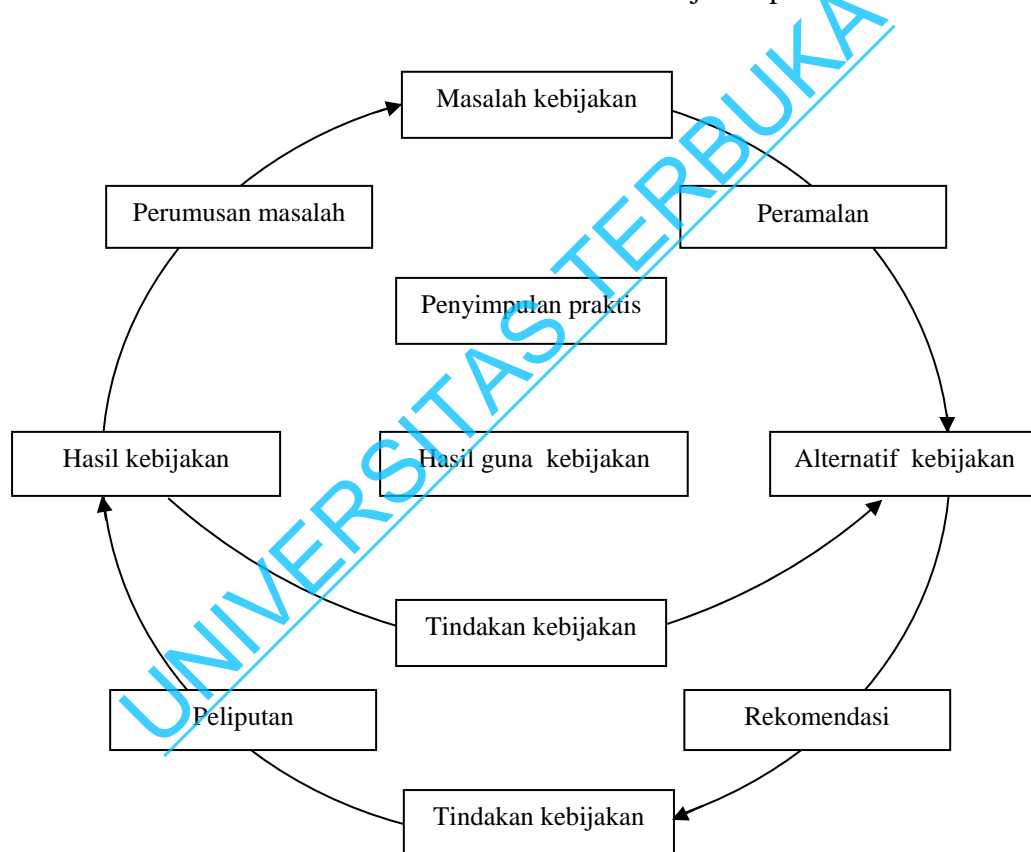
Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses penelitian yang melibatkan lima komponen informasi yang dipindahkan dari satu posisi ke posisi berikutnya melalui penggunaan beberapa metode analisis kebijakan. Dunn (1995)

menggambarkan lima komponen kebijakan dan proses analisis kebijakan dibawah ini.

Gambar 2.2. Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan



Gambar 2.3. Proses analisis kebijakan publik



Sumber: Dunn, 1995

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan **sebelum** adanya kebijakan publik tertentu dan **sesudah** adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar

sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Sedangkan analisis kebijakan setelah adanya kebijakan fokus analisisnya adalah kebijakan yang telah ada. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas (Kismartini, 2010).

### 3. Pengaruh kebijakan

Hasil akhir kebijakan adalah akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat (Wahab, 2004).

Pengaruh kebijakan juga sama artinya dengan dampak dari kebijakan. Menurut Dye (dalam Kismartini, 2010) bahwa dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Sedangkan Anderson (dalam Kismartini, 2010) menjelaskan dampak kebijakan merupakan semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata.

Menurut Dunn (1995), dalam memantau kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat yakni keluaran (output) dan dampak (impact). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficeries*). Sebaliknya dampak kebijakan merupakan

perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Hal yang sama diungkapkan oleh Islamy (2009) bahwa dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijaksanaan-kebijaksanaan. Mengutip pendapat Anderson dalam Islamy (2009), dimensi dampak kebijaksanaan negara sebagai berikut :

*“Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) atau tidak diharapkan (unintended consequences) baik pada problemnya maupun pada masyarakatnya.....Bila kebijaksanaannya mengenai memerangi kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat yang miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka. Tetapi mungkin akan timbul pula dampak yang tidak diharapkan yaitu sebagian anggota masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya program anti kemiskinan tersebut”.*

Untuk menjelaskan makna dampak, Kusumanegara (2010) menyatakan dengan sebuah konsepsi akademik yang dimulai dengan pertanyaan : “apa yang terjadi dengan adanya suatu program?”. Setelah itu dibuatlah suatu asumsi yaitu “pengukuran apakah program berhasil memecahkan masalah sosial”, termasuk disini pengukuran ekonomi. Sebagian besar pengukuran ekonomi itu digunakan untuk mengetahui keuntungan-keuntungan apa yang diraih oleh individu-individu. Setelah itu dampaknya terhadap masyarakat diukur dari agregasi (atau perkiraan efek agregasi) tingkat keuntungan yang didapatkan oleh individu-individu.

Ada empat tipe utama dampak dari program-program domestik yang dapat diuji oleh para ilmuwan yaitu dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada proses pembuatan kebijakan, dampak pada sikap-sikap publik serta dampak pada kualitas kehidupan. Tidak semua program mempunyai dampak yang mencakup



seluruh dimensi tersebut. Oleh karena itu para analis harus membuat pilihan apa yang akan dianalisis dan menetapkan pengukuran konsep-konsep utamanya serta kemudian melakukan analisa yang mungkin bisa dilakukan (Kusumanegara, 2010).

#### **4. Rumah tangga miskin (RTM)**

Lubis (2004) mendefinisikan miskin sebagai ketidakmampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu bentuk kemiskinan tidak hanya unidimensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabat. Sedangkan kemiskinan menurut Pasandaran (1994) adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidakmampuannya untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan dirinya, mempersulit masyarakat secara luas dan dengan sendirinya menghambat pembangunan.

Arsyad (1992) menyatakan ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan pendapatan dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Sedangkan kemiskinan relatif menekankan tingkat kemiskinan yang lebih ditujukan pada perbandingan tingkat kehidupan satu wilayah dengan wilayah lain.

Tingkat kemiskinan penduduk ditinjau dari segi pendapatan diukur dari pengeluaran kebutuhan dasarnya. Indikator yang digunakan untuk menyatakan

kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar adalah *Head Count Index* (HCI), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (Lubis, 2004).

Menurut Chambers (1987), inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

**Rumah tangga miskin (RTM)** adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei data dasar rumah tangga (DDRT) dengan 13 indikator kemiskinan. Indikator Kemiskinan yang digunakan meliputi: (1). tingkat pendidikan, (2) jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, (3) konsumsi pangan, (4) konsumsi non pangan, (5) modal (lahan, tabungan, hewan ternak), (6) sarana transportasi, (7) perabotan rumahtangga, (8) luas tempat tinggal, (9) kondisi tempat tinggal, (10) sumber air minum, (11) sumber penerangan, (12) asupan gizi, (13) porsi pangan antar anggota rumahtangga (Pedoman Umum Proksi Desa Mandiri Pangan, 2010).

**DDRT** adalah jenis survey untuk mengetahui karakteristik rumah tangga. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui survey rumah tangga (SRT). **SRT** adalah survey/pendataan mendalam rumah tangga miskin sasaran untuk mengetahui potensi dan kondisi serta karakteristik rumahtangga miskin secara mikro yang perlu diberdayakan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan.

**Output** yang dihasilkan adalah karakteristik rumah tangga miskin (jumlah

tanggung, jenis pekerjaan dan lain-lain; aspek ketahanan pangan (ketersediaan dan konsumsi pangan); daya beli rumahtangga.

Menurut Sudantoko dan Hamdani (2009), konsep dan definisi kemiskinan di Indonesia diterapkan oleh beberapa lembaga pemerintah. BKKBN (Badan koordinasi keluarga berencana nasional) menggunakan konsep pendekatan kesejahteraan keluarga. Lembaga ini membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan yakni keluarga pra sejahtera (Pra KS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III plus). Kriteria keluarga yang dikategorikan keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera I (KS I).

Kemudian BPS (Badan pusat statistika) menggunakan studi penentuan kriteria penduduk miskin (SPKPM) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini dilakukan karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic net approach*) untuk mengukur kemiskinan. Ada delapan variabel yang digunakan untuk mencirikan kemiskinan yakni luas lantai, jenis lantai, air minum (ketersediaan air bersih), jenis jamban/WC, kepemilikan asset, pendapatan (total pendapatan per bulan), pengeluaran (total pengeluaran per bulan), dan konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam).

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2008, mengacu pada hasil DDRT dan SRT program aksi desa mandiri pangan secara nasional, dari 314.367 rumah tangga sasaran tahun 2006-2008 yang tergabung dalam

kelompok afinitas, sebanyak 173.800 KK atau 53,7% keluarga miskin. Dengan perkiraan bahwa setiap KK miskin mempunyai 5 orang anggota rumah tangga, maka program desa mandiri pangan (Demapan) ini telah dapat membantu masyarakat miskin sebanyak 869.000 jiwa untuk melakukan berbagai usaha di pedesaan. Untuk membantu anggota kelompok binaan, telah disalurkan bantuan Rp. 178,05 milyar, dengan alokasi Rp. 80.000.000, perdesa untuk digunakan oleh kelompok dan perorangan dalam pengembangan berbagai jenis usaha seperti dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan Jumlah Lokasi dan KK Miskin  
Desa Mandiri Pangan Tahun 2006 – 2008

Tahun	Lokasi			Jumlah kelompok afinitas			Jumlah bantuan modal usaha (Rp.)
	Propinsi	Kabupaten	Desa	KK	KK miskin		
					KK	%	
2006	30	122	250	124.010	68.828	53,94	53.066.765.000
2007	32	180	354	138.845	79.339	64,0	91.201.004.000
2008	32	201	221	51.462	27.633	53,70	33.780.000.000
Jumlah	32	201	825	314.367	174.048	55,36	178.047.769.000

Sumber data : Laporan Kinerja BKP tahun 2008

Berdasarkan data base mandiri pangan (Desa Mapan) tahun 2006-2009 yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program tersebut pada tahun 2006 sejumlah 2049 KK dengan jumlah bantuan sosial desa mandiri pangan sebesar Rp.800.000.000 . Data lokasi desa mandiri pangan dan jumlah KK miskin tiap desa sasaran pada tahun 2006 ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah KK Miskin Desa Mandiri Pangan Tahun 2006  
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	KK Miskin	Jumlah bantuan modal usaha (Rp)
1	Belitung	Membalong	1. Gunung Riting	163	Rp. 100.000.000
			2. Simpang Rusa	277	Rp. 100.000.000
2	Bangka	Puding Besar	1. Labu	157	Rp. 100.000.000
		Mendo Barat	2. Air Buluh	153	Rp. 100.000.000
3	Bangka Selatan	Pulau Besar	1. Panca Tunggal	157	Rp. 100.000.000
			2. Fajar Indah	234	Rp. 100.000.000
4	Pangkalpinang	Gerunggang	1. Tuatunu	602	Rp. 100.000.000
		Bukit Intan	2. Sriwijaya	306	Rp. 100.000.000
Jumlah		6 kec.	8 desa	2049 KK	Rp. 800.000.000

Sumber data : Data Base Mandiri Pangan, BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

## 5. Konsep pendapatan

Konsep pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pendapatan yang dikemukakan oleh Rahardja dan Manurung (2008) yakni pendapatan personal disposable (*disposable personal income*) dengan pengertian pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung.

Lebih luas lagi untuk melihat perubahan pendapatan dengan digunakan konsep penghasilan. Ikatan Akuntansi Indonesia (2004), mendefinisikan penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Kemudian Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Definisi tersebut

memberikan pengertian yang berbeda dimana *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasilan dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yakni 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk (Sudantoko dan Hamdani, 2009).

Dalam kaitannya dengan program aksi desa mandiri pangan, melalui berbagai jenis kegiatan, pendapatan masyarakat desa diharapkan dapat meningkat, sehingga setiap keluarga akan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, dan dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif

peluang dan pemecahan masalah, sehingga mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian (Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2008).

## 6. Program aksi desa mandiri pangan

Dalam rancangan RPJM 2010-2014, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian mengacu kepada 11 (sebelas) prioritas kebijakan dan strategi nasional. Dari 11 prioritas nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian adalah prioritas nomor 5 yaitu **ketahanan pangan**. Yang dimaksud dengan prioritas ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Secara nasional, target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3-6,8%, mencapai 7% pada tahun 2013 dan minimal 7% pada tahun 2014, dengan inflasi rata-rata 4-6%, pengangguran 5-6% pada tahun 2014, dan kemiskinan 8-10% pada tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian sebesar 3,7% dan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014 (Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011).

Dalam arah kebijakan dan strategi nasional, prioritas ketahanan pangan memiliki 6 (enam) substansi utama, yaitu (1) lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian dilaksanakan dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan penertiban dan optimalisasi penggunaan lahan terlantar; (2)



infrastruktur, dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, jaringan listrik serta teknomogi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; (3) penelitian dan pengembangan bidang pertanian, dalam kemampuan menciptakan benih unggul dan penelitiannya; (4) investasi pangan pertanian dan industri pedesaan berbasis pangan lokal, penyediaan pembiayaan dan subsidi yang menjamin ketersediaan benih unggul, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau; (5) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH); dan (6) pengambilan langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Pembangunan pertanian utamanya adalah peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Ada 4 target/sasaran utama kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu (1) pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi berkelanjutan, dan pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri secara berkelanjutan; (2) pengembangan penganekaragaman pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; (3) peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan) Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2010, program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan sasaran rumah

tangga miskin yang dilakukan di desa rawan pangan, dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Proksi Desa Mapan ini secara konseptual memiliki 3 (tiga) variabel kegiatan yang satu sama lainnya memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat erat yakni : 1) pemberdayaan masyarakat, 2) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan 3) integrasi program lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana pedesaan. Ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Variabel pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi kehidupan mereka sendiri.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :

*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on).*

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Menurut Arbi Sanit dalam Chalid (2010), pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi suatu kekuatan nyata, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam segenap aspek kehidupan. Sebagai basis dari kehidupan masyarakat maka penguatan ekonomi rakyat, disamping pematangan budaya dan pemantapan agama, merupakan langkah yang sangat mendasar dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Chamber dalam Kartasasmita (1996) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable*". Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (1996) dapat dilihat dari tiga sisi yakni Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi yang berarti mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yakni kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan sekunder yaitu

kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, 2002).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2002) harus mengikuti pendekatan sebagai berikut; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu.

Pendekatan kelompok ini paling efektif dalam penggunaan sumber daya atau potensi yang dimiliki.

Dalam panduan penanggulangan kemiskinan (2011) secara nasional maupun di tingkat daerah, memberdayakan kelompok masyarakat miskin menjadi satu diantara empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan selain memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar dan pembangunan inklusif. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar mereka dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini termasuk dalam klauster kedua sasaran penerima manfaat program yang selaras dengan tujuan pembangunan milenium (*Millenium development goals/MDGs*) yang pertama yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Berdasarkan beberapa perspektif dari para pakar tersebut diatas, konsepsi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari aspek pendampingan yang merupakan perwujudan dari pandangan Arbi Sanit yakni sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat serta pandangan dan juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) sebagaimana disampaikan oleh Kartasasmita. Kemudian konsepsi pemberdayaan masyarakat juga dilihat dalam aspek penguatan kelembagaan. Hal ini didukung pandangan Soemadiningrat yakni pentingnya menggunakan pendekatan kelompok dalam efektifitas pengorganisasian potensi yang dimiliki masyarakat.

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat juga memerlukan dukungan kekuatan finansial dalam mendorong penguatan keberdayaan kelompok masyarakat.

Dukungan bantuan keuangan dalam bentuk permodalan dan bantuan dana langsung ini merupakan salah satu fokus pemberdayaan masyarakat dalam aspek pemberdayaan ekonominya. Hal ini sejalan dengan pendapat Payne (1995) yakni agar seseorang bisa berdaya perlu ada pembagian atau pemberian kekuatan dari lingkungannya. Pembagian kekuatan atau pemberian kemampuan ini bisa diartikan sebagai saling membagi kekuatan (*power sharing*) dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang tidak berdaya sehingga mereka mempunyai kemampuan yang setara.

*To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.*

Dengan demikian dapat dirumuskan indikator untuk mengukur kegiatan pemberdayaan masyarakat yakni :

a) Pendampingan

Pendampingan merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan mendorong kelompok masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dirinya sehingga mampu beraktualisasi dalam dinamika sosial dan tantangan hidup yang dihadapinya. Aktualisasi diri ini memberikan semangat menentukan pilihan-pilihan terbaik dalam bermasyarakat, kehidupan ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan

jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Kegiatan pendampingan ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dengan konsistensi setiap tahapan pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas (tenaga pendamping) untuk dapat mengawal proses pelaksanaan pendampingan termasuk mengukur pencapaian keberhasilan pemberdayaan yang dijalankan. Tenaga pendamping dalam Proksi Demapan ini berasal dari tenaga yang direkrut dengan kriteria khusus selain memiliki tingkat pendidikan tinggi juga merupakan tenaga yang berasal dari lokasi sasaran program atau yang bersedia ditempatkan di lokasi kegiatan. Tenaga pendamping diangkat melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan mekanisme kontrak dalam jangka waktu setahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 4 (empat) tahun.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan selama program berjalan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian adalah (a) menumbuhkan, membina dan mengembangkan dinamika kelompok afinitas, (b) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa (TPD) dan kelompok-kelompok afinitas, (c) menumbuhkan usaha produktif kelompok afinitas, (d) pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usaha tani dan lain-lain. Keberhasilan dari kegiatan pendampingan ini antara lain dapat dilihat dari adanya kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir dan keterampilan masyarakat.

## b) Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Sebagai bagian yang penting dari pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ini mutlak dilaksanakan dalam mewujudkan kesetaraan serta keberdayaan bersama dalam kelompok masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan lebih sekedar upaya penguatan individu masyarakat. Penguatan pranata-paranata sosial yang ada baik dalam bentuk kelembagaan maupun nilai-nilai berkemajuan menjadi orientasi pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soemadiningrat (2002) yakni pentingnya menggunakan pendekatan kelompok dalam efektifitas pengorganisasian potensi yang dimiliki masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang akan ditumbuhkan dan dikembangkan dalam Proksi Demapan antara lain Kelompok Afinitas yang berperan sebagai pelaku pengembangan usaha produktif, Tim Pangan Desa (TPD) yang berperan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai layanan usaha produktif pedesaan. Kelompok Afinitas adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama. Anggota kelompok afinitas adalah seluruh rumah tangga miskin (RTM) hasil dari survey data dasar rumah tangga (DDRT) dengan jumlah anggota antara 20 s/d 30 orang, yang dibina melalui Proksi Desa Mapan.

Tim Pangan Desa (TPD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di pedesaan.



Keanggotaan TPD terdiri dari : aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan tokoh dari kelompok afinitas, penggerak PKK dan Penyuluh. Sedangkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif masyarakat desa.

c) Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK)

Modal fisik penting sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat . Modal fisik ini antara lain dalam bentuk bangunan dan infrastruktur. Modal fisik ini dapat diartikan juga dalam bentuk bantuan permodalan sebagai dana stimulan untuk mendorong penguatan usaha ekonomi kelompok. Hal ini didasari dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga miskin yang sangat terbatas. Mubyarto dalam Weningsih dkk. (1998) menegaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi pada seseorang atau sebuah keluarga, bukan karena dikehendaki melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Stimulan bantuan finansial dalam Proksi Demapan dikenal dengan istilah dana PUMK (Penguatan modal usaha kelompok). Dana ini bersumber dari dana APBN melalui kelembagaan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam bentuk dana bantuan sosial (Bansos). Dana bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang bagi pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. Dana bantuan sosial merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan motor penggerak utama

pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha produktif.

Dana bansos dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok. Jenis kegiatan usaha produktif dapat dilakukan dalam bidang *on farm, off farm dan non farm*. Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok untuk modal usaha produktif dilakukan pada tahap penumbuhan. Setelah kelompok diberdayakan, mengajukan kegiatan dengan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan kemampuan usaha. Pengawasan pemanfaatan dana bansos oleh kelompok dilakukan pendamping, TPD dan PPK provinsi atau kabupaten/kota.

b. Variabel Pengembangan sistem ketahanan pangan masyarakat

Secara nasional pengertian ketahanan pangan telah menjadi perdebatan selama tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan (Stevens et al. dalam Hanani 2008).

Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia yakni akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy*

*life*). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu (Hanani, 2008) :

1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 : kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. USAID (1992) : kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
3. FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
4. FIVIMS (2005): kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5. Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selera untuk hidup produktif dan sehat.

Sutawan (1998) menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijaksanaan pangan yakni peningkatan produksi untuk memelihara swasembada pangan, peningkatan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, pelestarian sumber daya alam, mendukung industrialisasi, peningkatan kualitas pangan, penganeekaragaman pangan dengan gizi yang berimbang dan terjangkau oleh konsumen, dan mengendalikan persediaan dan menstabilkan harga secara maksimal.

Pengembangan sistem ketahanan pangan meliputi : 1) *sub sistem ketersediaan pangan* untuk meningkatkan produksi dan cadangan pangan masyarakat, 2) *sub sistem distribusi/akses* yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli serta menjamin stabilisasi pasokan, dan 3) *sub sistem konsumsi* untuk

peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan, sehingga dapat tercapai ketahanan pangan masyarakat.

Dengan demikian indikator-indikator untuk mengukur kegiatan pengembangan sistem ketahanan pangan yakni :

a) Peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat

Malthus dalam Rusli (1989) menjelaskan keterkaitan antara variabel ketersediaan pangan dengan perkembangan jumlah penduduk. Pakar yang terkenal dengan teori kependudukannya atau "*Population trap*" ini memulai dengan dua postulatnya. *Pertama*, bahan pangan dibutuhkan untuk hidup manusia dan *kedua*, kebutuhan nafsu seksual antar-jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Atas dasar postulat itu, Malthus kemudian mengatakan bahwa jika tidak ada pengekangan, maka kecenderungan penambahan jumlah manusia akan lebih cepat daripada penambahan bahan pangan. Perkembangan jumlah penduduk akan mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan bahan pangan akan mengikuti deret hitung.

Teori Malthus ini menjadi relevan ditengah kondisi ketersediaan pangan yang sangat terbatas saat sekarang yakni adanya kesejangan antara permintaan dan penawaran. Untuk itu diperlukan peningkatan produksi dan cadangan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Upaya peningkatan produksi pangan ini tidak hanya terfokus pada komoditas beras melainkan pangan alternatif yang memiliki karbohidrat tinggi seperti jagung, singkong dan jenis umbi-umbian lainnya.

Pencapaian peningkatan ketersediaan pangan ini dihadapkan dengan banyak masalah. Suryana (2011) berpendapat tingkat produktivitas petani lebih rendah dibanding usaha lainnya. Kondisi ini terkait dengan luas lahan yang mereka olah sangat terbatas dan dengan teknologi yang sangat sederhana, serta modal yang didapat juga terbatas. Kendatipun insentif yang diberikan pemerintah dalam berproduksi seperti subsidi pupuk, subsidi benih, penyediaan pengairan, permodalan melalui kredit usaha rakyat, pengembangan agribisnis dan sebagainya terus dilakukan sampai sekarang.

Dalam kebijakan umum ketahanan pangan (KUKP) 2006 – 2009, peningkatan produksi pangan untuk kebutuhan pangan sendiri merupakan pilihan utama untuk mengurangi ketergantungan pangan dari pihak luar (melalui impor). Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri (khususnya bahan pangan pokok) menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan produksi pangan domestik, diperlukan kebijakan yang kondusif meliputi insentif untuk berproduksi secara efisien dengan pendapatan yang memadai, serta kebijakan perlindungan dari persaingan usaha yang merugikan petani. Secara mikro, pada tingkat rumah tangga miskin, peningkatan produksi usaha tani melalui kebijakan tersebut sangat penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan

cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Informasi cadangan pangan khususnya untuk skala rumah tangga miskin berguna untuk mengetahui tingkat pengeluarannya terhadap pangan pokok setidaknya dalam dimensi waktu harian atau mingguan. Hal ini sangat tergantung dengan tingkat pendapatan rumah tangga miskin tersebut.

b) Kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli serta menjamin stabilisasi pasokan dan harga

Penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan merupakan bagian dari fungsi fasilitasi pemerintah yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek efektivitas distribusi pangan sekaligus aspek efisiensi secara ekonomi. Biaya distribusi yang paling efisien harus menjadi acuan utama agar tidak membebani produsen dan konsumen secara berlebihan.

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja sub sistem distribusi. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Terkait dengan masalah harga pangan ini, Todaro (1994) melihat beberapa negara yang sedang berkembang dalam mengejar pembangunan industri dan perkotaan secara cepat biasanya mempertahankan harga-harga hasil pertanian yang murah sebagai usaha menyediakan pangan yang murah untuk sektor moderen perkotaan. Nisabah (ratio) harga antara barang pangan dan barang pabrik merugikan para petani dan menguntungkan para industrialis di kota. Dengan demikian jika pemerintah ingin meningkatkan produksi pertaniannya maka

mereka bukan hanya harus menyesuaikan kelembagaan dan pasar perkreditan yang tepat guna, tapi juga memberikan rangsangan kepada para petani kecil dan menengah dengan menerapkan kebijakan harga yang mencerminkan kondisi pasar internal.

Selanjutnya dalam hal kebijakan harga di bidang pertanian, Bechtold (1988) membagi dalam dua jenis kategori yaitu stabilisasi harga dan penetapan tingkat harga (perlindungan harga). Kebijaksanaan harga rendah untuk produsen dan konsumen, kebijaksanaan harga rendah untuk konsumen, dan kebijaksanaan harga tinggi untuk produsen dan konsumen. Semuanya ini masing-masing diperbandingkan dengan alternatif-alternatif pada perdagangan bebas, dan tentu saja yang menikmati dari sistem harga rendah adalah konsumen yang di *supply* dari jumlah besar dan harga rendah. Pengaruh subsidi konsumen akan tampak dengan jelas jika tingkat harga rendah tersebut meliputi komoditas bahan pangan pokok atau bahkan juga semua produk pertanian.

c) Peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan

Kinerja subsistem konsumsi tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Pola konsumsi tingkat rumah tangga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat (beragam dan bergizi seimbang) perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal.

Pola konsumsi ini sangat erat hubungannya dengan tingkat pendapatan rumah tangga miskin, selain faktor pengetahuan yang dimilikinya. Dengan tingkat pendapatan yang memadai, pola konsumsi dengan anjuran beragam dan bergizi seimbang bisa diterapkan dengan baik. Sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan secara langsung berpengaruh pada perilaku konsumsi rumah tangga tersebut.

Suryana (2011) menjelaskan upaya peningkatan pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, dan (c) mengembangkan keamanan pangan segar di sentra produksi pangan.

c. Variabel integrasi program lintas sektoral

Istilah integrasi program lintas sektoral ini hampir sama dengan konsep integrasi stratejik yang dilaksanakan dalam dunia usaha. Integrasi stratejik oleh Pitts dan Lei dalam Satmoko (2005) merupakan bentuk kerjasama yang lebih erat yang biasanya melibatkan dua atau lebih perusahaan yang masih berada dalam satu lini usaha. Upaya untuk membangun integrasi stratejik yang sukses bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Keberhasilan strategi integrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketergantungan, lama hubungan atau umur hubungan, fleksibilitas, dan keinginan untuk melanjutkan hubungan. Jalinan komunikasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah hubungan kerjasama.

Dasar membangun hubungan kerjasama baik dalam dunia borokrasi melalui program maupun dunia usaha memiliki argumentasi filosofis. Herawan (2007)



secara sederhana mencontohkannya bahwa manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya jika manusia bekerja sendiri karena keterbatasan biologis dan psikologisnya. Manusia memerlukan orang lain yang perlu diajak bekerjasama. Sistem kerjasama yang diatur dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu sifatnya menjadi formal. Sistem kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu, berlangsung dalam suatu waktu tertentu dan mempunyai identitas diri.

Jenis kerjasama tersebut tidak terhitung banyaknya, dalam garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: (a) Jenis kerjasama yang berhubungan dengan aspek lingkungan meliputi faktor geografis, faktor sarana prasarana yang dipergunakan organisasi; (b) Jenis kerjasama yang berhubungan dengan aspek sosial, meliputi subsistem dari organisasi yang lebih besar dan mempunyai lingkungan sosial yang lebih luas; (c) Jenis kerjasama yang berhubungan dengan aspek individual, meliputi hubungan interelasi antar individu secara sistematis; dan (d) Jenis kerjasama yang berhubungan dengan variabel-variabel lain.

Pelaksanaan program pemerintah khususnya di bidang ketahanan pangan memerlukan kerjasama dan dukungan lintas sektoral melalui program yang terintegrasi. Ketahanan pangan masyarakat khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan rumah tangga miskin memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program lintas sektor yang diimplementasikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana pedesaan.

a) Perbaikan infrastruktur pedesaan

Infrastruktur memegang peranan penting dan vital dalam mendukung ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai modal

sosial masyarakat dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Secara umum pengembangan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat seperti air minum pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, PSD permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya (Dardak, 2004).

Infrastruktur berperan vital dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi maupun input produksi lainnya. Jaringan jalan misalnya, merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dengan demikian pembangunan infrastruktur pedesaan seperti infrastruktur kesehatan, air bersih, irigasi, jalan, pendidikan, termasuk infrastruktur penyuluhan, memiliki peranan yang besar dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

b) Dukungan program lintas sektoral

Pandangan yang relevan untuk melihat keterkaitan antar program dalam birokrasi yang disampaikan oleh Suwatri (2011) melalui konsepsi jejering kebijakan. Dalam pembangunan nasional, jejering kebijakan dapat membentuk kebijakan deliberatif (berunding) antar sektor, antar wilayah, antar kementerian

yang dapat dimulai pada tingkat desa atau kelurahan. Kemudian keberadaan jejaring kebijakan adalah untuk mencegah terjadinya refraksi tujuan sebagai akibat interaksi aktor dan sistem nilai yang dimiliki para aktor kebijakan.

Program yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat miskin antara lain program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), Desa Siaga, Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), kelompok usaha bersama (KUBE) dan program bantuan sosial lainnya. Diharapkan adanya integrasi yang saling memperkuat antar program lintas sektor tersebut dengan program aksi desa mandiri pangan sehingga kepentingan publik yakni kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi melalui peningkatan pendapatannya.

## 7. Penelitian sebelumnya

Penelitian yang terkait dengan dampak program pemerintah terhadap pendapatan penduduk miskin antara lain yang dilakukan oleh Weningsih dkk. (1998) yang berjudul *“Evaluasi pelaksanaan program inpres desa tertinggal (IDT) dan dampaknya terhadap pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Dati II Banyumas”* dengan hasil sebagai berikut :

- Pelaksanaan program IDT di Kabupaten dati II Banyumas dimulai tahun anggaran 1994/1995 belum menunjukkan hasil yang diharapkan dari tujuan akhir program IDT. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari perbandingan rata-rata income perkapita sebelum dan sesudah menerima bantuan modal IDT yang hanya meningkatkan jumlah penduduk tidak miskin sebesar 1,33%.
- Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme program seperti apa yang digariskan oleh

pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian dimana pembentukan pokmas yang kurang demokratis, kemampuan pendamping yang tidak sesuai dengan kegiatan dan penelitian jenis usaha yang tidak tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramly K.T Kusumo (2008) yang berjudul “*Kajian dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor*” dengan kesimpulan penelitiannya yakni berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor belum mempunyai dampak positif terhadap kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan penduduk miskin. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya peningkatan capaian indikator kemiskinan dan yang terjadi sebaliknya rumah tangga miskin mengalami peningkatan menjadi 34,81%. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan target program yakni mengurangi jumlah penduduk miskin.

Ikhtisar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan untuk peningkatan pendapatannya yang dilaksanakan negara Australia melalui lembaga AusAID (*Australian agency for international development*). Dalam buku *Income Generation for the Rural Poor* (2000), lembaga ini memaparkan strategi pembangunan sektor pedesaan melalui program bantuan terhadap negara-negara mitra. Strategi yang dikembangkan adalah memprioritaskan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan melalui peningkatan peluang bagi masyarakat miskin untuk menghasilkan pendapatan dengan memberikan kebebasan pilihan kepada mereka untuk memperbaiki kehidupannya. Strategi ini memungkinkan mereka untuk membangun modal (asset), mengurangi kerentanan terhadap bencana dan meningkatkan ketahanan pangan mereka. Strategi peningkatan

pendapatan masyarakat miskin daerah pedesaan tersebut terdiri dari tiga komponen yakni : peningkatan produktivitas sektor pertanian, mendorong pekerjaan diluar sektor pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produksi melalui perbaikan manajemen dan praktek usaha tani, diversifikasi produk pertanian dan mempromosikan perdagangan terbuka untuk produk pertanian (produk pertanian berorientasi pasar global). Selanjutnya dalam mendorong pekerjaan diluar sektor pertanian dilakukan upaya penumbuhan usaha kecil dan menengah dalam memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatannya. Dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan diupayakan pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pedesaan melalui pendekatan manajemen dan teknis, termasuk daerah pedesaan yang terbatas sumber daya alamnya untuk menghindari eksploitasi jangka pendek.

Setelah mencermati variabel-variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka saya menggunakan variabel "Pendapatan" sebagai variabel terikat dengan "Pemberdayaan Masyarakat", "Pengembangan Sistem Katananan Pangan" dan "Integrasi Program Lintas Sektor" dalam Program aksi desa mandiri pangan sebagai variabel yang bebas (variabel yang mempengaruhinya).

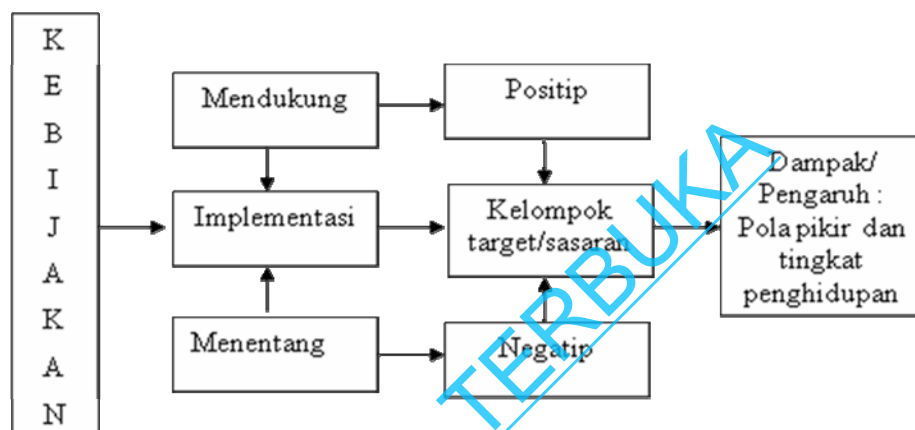
## B. Kerangka berfikir

Pengaruh program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat dilihat dalam variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel dalam program aksi desa mandiri pangan adalah variabel pemberdayaan masyarakat meliputi indikator pendampingan, indikator peran kelembagaan masyarakat dan indikator pemanfaatan dana penguatan mudal usaha kelompok (PMUK). Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah variabel pengembangan sistem ketahanan pangan meliputi indikator peningkatan produksi dan pengembangan cadangan pangan, pembukaan usaha-usaha perdagangan, pemasaran dan sistem harga, serta indikator peningkatan penganekaragaman pangan berbasis konsumsi dan pemanfaatan pekarangan. Faktor lainnya yakni variabel integrasi lintas sektoral meliputi perbaikan infrastruktur pedesaan dan dukungan program lintas sektoral (PNPM, Desa Siaga, dll).

Dalam penelitian ini melihat sejauhmana pengaruh variabel-variabel dalam program aksi desa mandiri pangan tersebut terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Variabel-variabel yang mempengaruhi tersebut dapat dilihat dalam kerangka pikir yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian ini. Kerangka pikir ini selain merupakan modifikasi dari kerangka pikir program aksi desa mandiri pangan juga berdasarkan teori dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2009) dan Kusumanegara (2010) serta konsepsi teoritis tentang keberhasilan suatu kebijakan yang menurut Mustopadidjaya (1988) yang disebabkan oleh 3 unsur yakni (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) adanya dukungan dari target group/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari perubahan, dan (3) unsur

pelaksanaan, baik organisasi maupun program yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, dikembangkan kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian ini.

Gambar 2.4.  
Skema Kerangka Berfikir



### C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin;
- b. Terdapat pengaruh pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin;
- c. Terdapat pengaruh integrasi program lintas sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin;
- d. Terdapat pengaruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh desa penerima manfaat program aksi Desa Mandiri Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 yang berjumlah 8 desa yakni Desa Labu dan Desa Air Buluh yang berada di Kabupaten Bangka, Desa Fajar Indah dan Desa Panca Tunggal yang berada di kabupaten Bangka Selatan, Desa Gunung Riting dan Desa Simpang Rusa yang berada di Kabupaten Belitung serta Kelurahan Tuatunu dan Kelurahan Sriwijaya yang berada di kota Pangkalpinang.

Tempat penelitian sengaja dipilih dengan pertimbangan kekhususan sebagai desa pelaksana program ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah tangga miskin di tempat penelitian telah melaksanakan program desa mandiri pangan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Sebagaimana yang digariskan dalam pedoman umum program aksi desa mandiri pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2010) untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut, rumah tangga miskin penerima manfaat program dilaksanakan pembinaan mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian selama 4 (empat) tahun. Seluruh desa tahun 2006 yang menjadi obyek penelitian telah memasuki tahun kemandirian (tahun ke-4) pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan mulai April sampai dengan Mei 2012.



## B. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin penerima manfaat Program Aksi Desa Mandiri Pangan tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah populasi penelitian sebanyak 2049 KK. Sampel dipilih dengan menggunakan tehnik *non probability sampling* yakni pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2000). Penarikan sampel dengan menggunakan sampling kuota sebesar 5% dari populasi sehingga ukuran sampel yang digunakan sebesar 102 KK. Ukuran sampel tersebut juga sejalan dengan pendapat Rescoe (Sugiyono, 2000) bahwa bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (regresi), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah variabel yang diteliti ada 4 variabel (independen dan dependen) sehingga jumlah anggota sampel minimal 40.

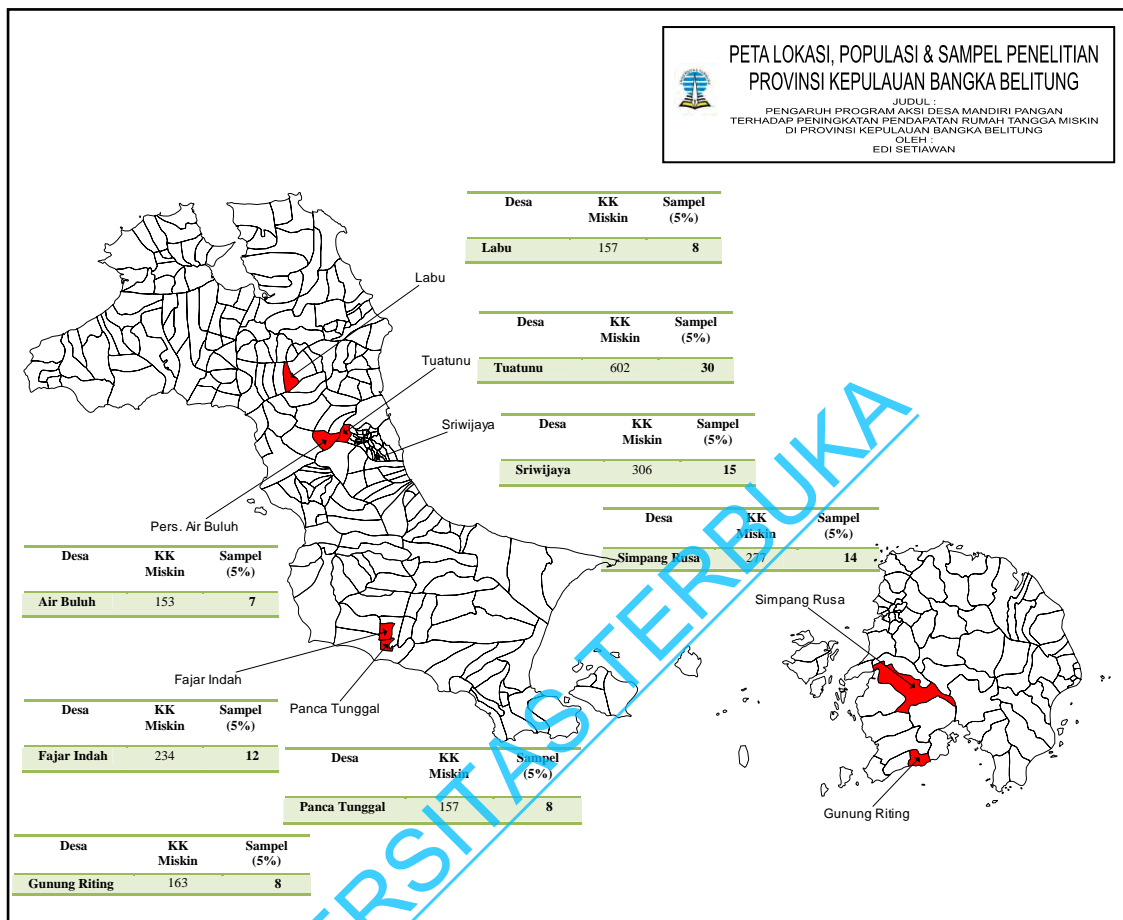
Jumlah sampel masing-masing desa disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Jumlah sampel penelitian

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	KK Miskin	Sampel
1	Belitung	Membalong	1. Gunung Riting	163	<b>8</b>
			2. Simpang Rusa	277	<b>14</b>
2	Bangka	Puding Besar	1. Labu	157	<b>8</b>
			2. Air Buluh	153	<b>7</b>
3	Bangka Selatan	Pulau Besar	1. Panca Tunggal	157	<b>8</b>
			2. Fajar Indah	234	<b>12</b>
4	Pangkalpinang	Gerunggang	1. Tuatunu	602	<b>30</b>
			2. Sriwijaya	306	<b>15</b>
Jumlah		6 kec.	8 desa	2049 KK	<b>102 KK</b>

Lokasi, populasi dan sampel penelitian terlihat dalam peta dibawah ini.

Gambar 3.1 Peta lokasi, populasi dan sampel penelitian



### C. Instrumen Penelitian

Panduan atau instrumen dalam melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Program Aksi Desa Mandiri Pangan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Variabel dan indikator penelitian

Variabel	Indikator
Pemberdayaan Masyarakat (X <sub>1</sub> )	a. Pendampingan b. Penguatan kelembagaan masyarakat c. Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK)
Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan (X <sub>2</sub> )	a. Peningkatan produksi dan pengembangan cadangan pangan b. Kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli dan jaminan stabilisasi pasokan c. Peningkatan penganeekaragaman pangan berbasis konsumsi dan pemanfaatan pekarangan
Integrasi Program lintas sektoral (X <sub>3</sub> )	a. Perbaikan infrastruktur pedesaan b. Dukungan program lintas sektoral
Pendapatan (Y)	Peningkatan pendapatan

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan prosedur sebagai berikut:

##### 1. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap rumah tangga miskin yang mencakup beberapa aspek seperti karakteristik umum rumah tangga miskin dan data lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh penulis dari informasi-informasi yang telah disediakan oleh unit-unit atau lembaga-lembaga yang ada.

2. Riset lapangan (*field research*).

Riset lapangan dalam rangka pengumpulan data dilakukan terhadap obyek penelitian dengan cara yaitu:

a. Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap aktifitas rumah tangga miskin yang saya lakukan dengan memanfaatkan kesempatan saat melaksanakan monitoring dan pembinaan dalam rangka kedinasan.

b. Kuesioner

Teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Teknik yang digunakan adalah analisa kuantitatif yang dikualitatifkan dengan menjelaskan indikator dari masing-masing variabel menggunakan skala Likert.

- ❖ Apabila jawaban “a” diberi nilai 5 = Sangat berpengaruh
- ❖ Apabila jawaban “b” diberi nilai 4 = Berpengaruh
- ❖ Apabila jawaban “c” diberi nilai 3 = Kurang berpengaruh
- ❖ Apabila jawaban “d” diberi nilai 2 = Tidak berpengaruh
- ❖ Apabila jawaban “e” diberi nilai 1 = Sangat tidak berpengaruh

Pengumpulan data primer, dibuat indikator masing-masing variabel dalam bentuk kuesioner yang dirancang berdasarkan skala Likert yang bersifat ordinal

(Singarimbun dan Effendi, 1989). Instrumen pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Guna kepentingan pengolahan statistik dengan regresi, data ordinal yang dihasilkan tersebut diubah menjadi data interval melalui proses transformasi menggunakan program *metode successive interval* (MSI).

### 1. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* (Sugiyono, 2000) yang rumusnya sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum x Y - \sum x \sum Y}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (N \sum Y)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi  
 n = Jumlah responden  
 X = Skor butir pertanyaan  
 Y = Skor total

Pengujian terhadap valid tidaknya butir pertanyaan dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien ( $r_{hitung}$ ) masing-masing item pertanyaan dengan nilai korelasi tabel ( $r_{tabel}$ ) pada taraf  $\alpha = 0,05$ . Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan dinyatakan valid.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan formula Alpha Cronbach (Sugiyono, 2000) dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2} \right]$$

Keterangan :

r	=	Koefisien reliabilitas
k	=	Jumlah butir pertanyaan
$\sigma^2$	=	varian butir pertanyaan
$\sigma^2 b$	=	varian skor tes

### c. Pengutipan

Pengumpulan data-data dan informasi mengenai teori-teori pembahasan diperoleh dari pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli kebijakan publik. Teori-teori tersebut banyak terdapat dalam buku-buku analisis kebijakan publik dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Tujuannya adalah agar penulisan tesis ini dapat tercapai dengan baik dan tepat sesuai dengan landasan teori yang ada.

### 3. Riset kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan alat bantu kalkulator dan komputer dengan program SPSS. Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, maka analisis yang dilakukan adalah tabel frekwensi, analisis korelasi/regresi dan uji signifikansi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut :



1. Melakukan pengukuran nilai terhadap jawaban masing-masing pertanyaan dengan mengatagorikannya yaitu sebagai berikut.

- a. Sangat tinggi      skor = 5
- b. Tinggi              skor = 4
- c. Sedang              skor = 3
- d. Rendah              skor = 2
- e. Sangat rendah      skor = 1

3. Mencari nilai skor setiap variabel dengan menggunakan nilai tengah atau nilai mean dari setiap variabel, dengan rumus :

$$M = X/N$$

M= Rata-rata

X = Jumlah hasil hitungan variabel

N = Jumlah subjek sampel (dalam hal ini N=semua anggota populasi)

4. Mencari hubungan/pengaruh setiap variabel penelitian, yaitu :

- a. Hubungan/pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan rumah tangga miskin;
- b. Hubungan/pengaruh pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin;
- c. Hubungan/pengaruh integrasi program lintas sektor terhadap pendapatan rumah tangga miskin;
- d. Secara bersama-sama hubungan/pengaruh pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral dengan pendapatan rumah tangga miskin.

## 5. Analisis data

Data-data yang telah ada dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan sistem model statistik dalam program komputer (SPSS 17). Metode analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi variabel pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan, integrasi lintas sektor, dan pendapatan. Analisis ini digunakan dalam bentuk tabel dan nilai rata-rata untuk memperjelas deskripsi variabel.

### b. Analisis regresi linier sederhana dan berganda.

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui nilai signifikansi serta besaran keterpengaruhannya variabel dependen apabila variabel independen berubah. Analisis regresi sederhana dilakukan terhadap pengujian hipotesis satu, dua dan tiga.

- $H_0: \beta = 0$ , berarti variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_a: \beta \neq 0$  berarti variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  dan dengan *degree of freedom* (k) dan (n-k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen, maka nilai  $t_{hitung}$  dirumuskan sebagai berikut.

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S_e \beta_i}$$

dimana

$$\beta_i = \text{Koefisien regresi}$$

$$S_e \beta_i = \text{Standard error koefisien regresi}$$

Nilai t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 5% dan  $df = (n-1)$ , sehingga:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Analisis regresi berganda dilakukan untuk pengujian hipotesis ke empat yaitu pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ , berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ , berarti bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  dan dengan *degree of freedom* (k) dan  $(n-k-1)$  dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen, maka nilai  $F_{hitung}$  dirumuskan sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

dimana:

$R^2 = R$  kwadrat

n = Banyaknya data

k = Banyaknya variabel independen

Nilai  $F_{tabel}$  ditentukan dengan melihat tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 5% dan  $df = (n-1)$ , sehingga:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau Sig. F < 5 % maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau Sig. F > 5 % maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran lokasi penelitian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota dengan total penduduk pada tahun 2010 sebesar 1.223.048 jiwa. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang disekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitar Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang dan Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Mendanau, Seliu, Nadu, Pelanduk, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada  $104^{\circ}50'$  sampai  $109^{\circ}30'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}50'$  sampai  $4^{\circ}10'$  Lintang Selatan, dengan luas daratan 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah. Secara klimatologi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pola tipe curah hujan tipe *momsunal* dan *equatorial*. Di Pulau Bangka tipe curah hujan *momsunal* yaitu curah hujan yang puncak tertinggi yang terjadi pada Desember dan yang terendah terjadi pada Juni hingga Agustus. Sementara di Pulau Belitung, memiliki tipe curah hujan *equatorial* yakni hujan yang terjadi sepanjang hari.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergantung pada sektor industri pengolahan yang merupakan sektor sekunder sebesar 21,48 % dari

Produk Domestik Regional Bruto. Sementara itu sektor primer yakni sektor pertanian sebesar 19,55 % dan sektor pertambangan sebesar 18,28 %. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009 sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 adalah 7,1 % dengan laju pertumbuhan sektor migas sebesar 3,53% dan non migas sebesar 3,77 %. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama mencapai 6,1%. Indeks pembangunan manusia meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menduduki peringkat ke 11 dari 33 provinsi dengan nilai IPM 72,55. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 19,55 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Padi merupakan bahan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyumbang sekitar 45 % atau 9680,39 ton dari total produksi sereal provinsi. Berdasarkan tabel 5 dan gambar 6, produksi sereal dan umbi-umbian di Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Kondisi fluktuatif ini disebabkan oleh pengaruh anomali iklim (curah hujan) dan program bantuan pemerintah dalam peningkatan produksi. Produksi padi relatif stabil dalam kurun waktu tersebut, mencapai 9819,64 ton pada tahun 2010.

Tabel 4.1  
Produksi bersih serealia pokok dan umbi-umbian tahun 2008-2010  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Serealia	2008 (ton)	2009 (ton)	2010 (ton)	Rata-rata 3 Tahun
Jagung	3152,22	2314,31	2090,52	2519,02
Padi	9221,83	9999,70	9819,64	9680,39
Ubi Jalar	4823,48	4188,44	2455,98	3822,63
Ubi Kayu	14851,02	17858,17	12879,87	15196,35

Sumber data : Laporan penyusunan peta FSVA, BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

Kebijakan dalam peningkatan ketersediaan berdasarkan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2007-2012 dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni (a) Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (b) Meningkatkan koordinasi pengelolaan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan; (c) Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Dalam upaya menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan kegiatan antara lain:

- (i) Pengembangan lahan beririgasi dan lahan kering

Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peratran secara lebih tegas, penataan

infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.

(ii) Pengembangan konversi dan rehabilitasi lahan

Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan kehutanan secara luas.

(iii) Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai

Kegiatan dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya air dan daerah aliran sungai.

(iv) Pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul dan alsintan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, pengembangan usaha penangkaran atau produksi benih/bibit sebar unggul berkualitas yang spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian.



(v) Pengaturan pasokan pupuk.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan pasokan dan harga pupuk, melalui regulasi yang tepat.

(vi) Pengembangan skim permodalan yang kondusif bagi petani dan nelayan.

Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administratif maupun beban finansial yang harus ditanggung petanin/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petanio/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/nelayan.

(vii) Peningkatan produktivitas melalui perbaikan genetik dan teknologi budidaya.

Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifikasi lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk menekan senjang hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani, meningkatkan efisiensi ke arah *zero waste*, memperbaiki/mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.

(viii) Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan.

Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan dan pengolahan tepat guna spesifikasi lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, peningkatan kesadaran dan kemampuan petani/nelayan untuk memanfaatkan teknologi pasca panen dan pengolahan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil.

(ix) Penyediaan insentif investasi di bidang pangan.

Kegiatan meliputi pemberian berbagai kemudahan kepada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perijinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya serta keamanan usaha dari tindak kriminal.

(x) Penguatan penguatan penyuluhan, kelembagaan petani/nelayan dan kemitraan.

Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan ketenagaan penyuluh pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Akses pangan tergantung



pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut. Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil, dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan mereka tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan pangan.

Secara global, penduduk yang tingkat pendapatan per kapitanya di bawah US\$ 1,25 (*Purchasing Power Parity*) per hari menurut Bank Dunia, dikelompokkan sebagai penduduk miskin. Pemerintah Indonesia menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar Rp. 200.262 orang/bulan pada tahun 2009 (sekitar US\$ 22) untuk keperluan perencanaan. Berdasarkan harga kebutuhan pokok di tingkat provinsi, garis kemiskinan yang digunakan oleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp. 246.169/orang/bulan tahun 2008. Semakin besar jumlah penduduk miskin di suatu wilayah maka akses terhadap pangan akan semakin rendah dan angka kerawanan pangan akan semakin tinggi.

Perkembangan jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2002 hingga 2008 mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin sebanyak 106,2 ribu orang dan menurun menjadi 86,7 ribu orang pada tahun 2008. Sedangkan persentase penduduk miskin menurun dari 9,74% pada periode juli 2005 menjadi 8,58% periode maret 2008.

Data kemiskinan terakhir berdasarkan rilis BPS bulan September 2011 sebesar 65,55 ribu orang (5,16 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 72,06 ribu orang (5,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun 6,51 ribu orang dan persentasenya turun sebesar 0,59 persen. Jika diurutkan secara nasional, angka kemiskinan di provinsi ini berada dalam rengking 31 dari 32 provinsi.

Berdasarkan daerah kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan, pada periode juli 2005 dan 2008 besarnya penduduk dibawah garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar berada di wilayah pedesaan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin wilayah perkotaan sebanyak 37,7 ribu orang atau 8,05% mengalami penurunan menjadi 36,5 ribu orang atau 7,57% pada tahun 2008. Sementara itu di wilayah pedesaan, jumlah penduduk miskin tahun 2005 sebanyak 57,6 ribu orang atau 11,28% dan mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 50,2 ribu orang atau 9,52%.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh kabupaten telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2008. Namun walaupun rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup besar.

## 2. Identitas responden

Jumlah responden penelitian sebanyak 102 KK yang tersebar di 6 desa yang menjadi lokasi penelitian. Berikut disampaikan identitas responden penelitian :

a. Jenis kelamin dan umur

Berdasarkan data yang diolah dari kuisioner dengan pengumpulan data yang diambil secara acak (*random sampling*), terdapat 71 responden yang berjenis kelamin laki-laki atau 69,6% dan 31 responden berjenis kelamin perempuan atau 30,4%. Sementara itu rata-rata umur responden adalah 44 tahun dengan umur terendah 19 tahun dan tertinggi 70 tahun.

Tabel 4.2. Jenis kelamin dan umur responden

Jenis Kelamin (org)		Rata-rata Umur (tahun)
Laki	Perempuan	
71	31	44
102		

Sumber data : diolah dari kuisioner

b. Status pernikahan dan jumlah anggota keluarga

Responden dengan status menikah sebanyak 87 orang (85,3%), yang belum menikah 1 orang (1%) dan dengan status janda/duda sebanyak 14 orang (13,7%). Sementara itu rata-rata jumlah anggota keluarga responden sebanyak 4 orang.

Tabel 4.3. Status pernikahan dan jumlah anggota keluarga

Status pernikahan (org)			Rata-rata jumlah anggota keluarga (org)
Belum menikah	Menikah	Janda/duda	
1	87	14	4
102			

Sumber data : diolah dari kuisioner



c. Pekerjaan dan tingkat pendidikan

Dilihat dari status pekerjaannya, sebagian besar responden berprofesi sebagai petani yakni sebesar 44% (45 orang). Kemudian yang bekerja sebagai pedagang sebesar 35,3% (36 orang) dan, 15,7% berprofesi sebagai buruh (16 orang) dan lain-lain sebesar 5% (5 orang). Untuk tingkat pendidikan, sebagian besar responden hanya tamat sekolah dasar (SD) yakni 50% (51 orang). Sementara yang tamat SMP sebanyak 30,4% (31 orang), tamat SMA sebanyak 17,6% (18 orang) dan yang tamat pendidikan perguruan tinggi dan responden yang tidak sekolah masing-masing 1 orang.

3. Pengatahuan umum responden tentang program aksi desa mandiri pangan

a. Pengetahuan responden tentang lokasi desa mandiri pangan

Sebagian besar responden mengetahui bahwa program desa mandiri pangan dilaksanakan di tempat tinggal mereka (99%). Hal ini menegaskan bahwa responden sudah mengetahui adanya program yang masuk ke desa mereka.

b. Status responden sebagai anggota kelompok afinitas

Berdasarkan data kuisioner, hampir seluruh responden menjadi anggota kelompok afinitas (99%). Hal ini menunjukkan bahwa responden terlibat dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan. Kemudian sebagian besar responden menjadi anggota kelompok afinitas sejak awal program desa mandiri pangan masuk ke desa mereka (98%) sementara responden lainnya masuk sebagai anggota kelompok setelah program berjalan (2%).

- c. Pengetahuan responden tentang keberadaan pendamping program, tim pangan desa (TPD) dan lembaga keuangan desa (LKD)

Seluruh responden mengetahui adanya pendamping program yang berfungsi melaksanakan pendampingan seluruh kegiatan di program desa mandiri pangan (100%). Hal ini menunjukkan bahwa responden pernah berhubungan dengan pendamping dalam aktifitas kelompok dan pengembangan usahanya. Dalam kaitannya dengan pengetahuan tentang keberadaan lembaga keuangan desa (LKD), hampir seluruh responden mengetahuinya (99%). Hal ini berhubungan dengan fungsi lembaga tersebut sebagai pengelola keuangan bantuan sosial desa mandiri pangan serta perannya dalam penyaluran modal kepada anggota kelompok afinitas. Tanggapan terhadap eksistensi tim pangan desa (TPD) sebagian besar responden menyatakan mengetahui adanya kelembagaan tersebut (98%). Hal ini menegaskan responden sudah memahami peran TPD dalam memfasilitasi kelompok dan pengembangan program di desa tersebut. Terlebih TPD juga terlibat dalam proses administrasi penyaluran modal (verifikasi usulan permohonan pinjaman modal) yang bersentuhan dengan anggota kelompok afinitas.

- d. Pengetahuan responden terhadap keberadaan petugas pembina kabupaten dan pembina provinsi

Responden sebagian besar sudah mengetahui keberadaan petugas pembina kabupaten (90,2%), namun demikian untuk responden yang belum mengetahui (9,8%) menunjukkan bahwa penting bagi petugas kabupaten untuk melaksanakan pembinaan secara kontinu dan intensif dalam bentuk



pertemuan atau kunjungan ke anggota kelompok afinitas. Sementara itu pengetahuan responden terhadap keberadaan petugas pembina provinsi yakni sebanyak 97 (96%) responden menyatakan mengetahuinya dan responden lainnya (4%) tidak mengetahui adanya petugas provinsi. Hal ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan petugas provinsi dalam pelaksanaan pembinaan program khususnya interaksi dengan anggota kelompok afinitas.

## **B. Uji instrumen**

Uji validitas dan reliabilitas terhadap data mentah dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah pertanyaan dan mengecek konsistensi alat ukur dari masing-masing kuesioner. Untuk memperoleh hasil perhitungan yang akurat, proses penghitungan menggunakan program SPSS versi 17.

### **1. Uji validitas**

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Uji validitas akan menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam penelitian ini akan dihitung uji validitas dengan menggunakan *The Pearson Product Moment Correlation Method* yang diuji dengan cara menghitung korelasi dari setiap indikator pada setiap variabel dengan skor totalnya.

Dari hasil analisis terhadap data hasil kuisisioner, didapat nilai skor item dengan skor total setelah dibandingkan dengan r tabel yang dicari pada signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ) dengan uji 2 sisi dan sampel sebanyak 102 ( $n =$

102), maka  $r$  tabel ditemukan dengan nilai sebesar 0,195. Nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel maka butir pernyataan tersebut tidak valid dan apabila  $r$  hitung  $> r$  tabel, maka butir pernyataan tersebut dapat digunakan (valid). Dengan demikian perhitungan statistik untuk masing-masing variabel ternyata bahwa  $r$  hitung yang diperoleh lebih besar dari  $r$  tabel, sehingga dikatakan bahwa semua butir kuesioner baik dilihat dari variabel pendapatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan lintas sektoral berpredikat valid.

Nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen setiap variabel, disajikan sebagai berikut :

a) Variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ )

Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 4.4  
Rekapitulasi Nilai  $r$  Untuk Uji Validitas Instrumen Penelitian  
Variabel Pemberdayaan Masyarakat ( $X_1$ )

Nomor Kuestoner	$r$ -hitung	$r$ -tabel	Keterangan
1	0,985	0,195	valid
2	0,985	0,195	valid
3	0,986	0,195	valid
4	0,985	0,195	valid
5	0,985	0,195	Valid
6	0,985	0,195	Valid
7	0,985	0,195	Valid
8	0,985	0,195	Valid
9	0,985	0,195	Valid
10	0,985	0,195	Valid

Sumber data : diolah dari kuisisioner

Berdasarkan data yang tertera pada table 4.4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ) yang diperoleh rata-rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh instrument sebanyak 10 butir pertanyaan dikatakan valid.

b) Variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ )

Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel pengembangan sistem ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini :

Tabel 4.5  
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Instrumen Penelitian  
Variabel Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan ( $X_2$ )

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,964	0,195	Valid
2	0,968	0,195	valid
3	0,965	0,195	valid
4	0,967	0,195	valid
5	0,965	0,195	valid
6	0,965	0,195	valid
7	0,965	0,195	valid

Sumber data : diolah dari kuisisioner

Berdasarkan data yang tertera pada table 4.5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) yang diperoleh rata-rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh instrument sebanyak 7 butir pertanyaan dikatakan valid.

c) Variabel dukungan lintas sektoral ( $X_3$ )

Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel dukungan lintas sektoral dapat dilihat pada tabel 4.6.



Tabel 4.6  
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Instrumen Penelitian  
Variabel Integrasi Program Lintas Sektoral ( $X_3$ )

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,915	0,195	valid
2	0,941	0,195	valid
3	0,916	0,195	valid
4	0,931	0,195	valid

Sumber data : diolah dari kuisisioner

Berdasarkan data yang tertera pada table di atas. dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ ) yang diperoleh rata-rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh instrument sebanyak 4 butir pertanyaan dikatakan valid.

d) Variabel pendapatan (Y)

Nilai koefisien korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7  
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Instrumen Penelitian  
Variabel Pendapatan (Y)

Nomor Kuesioner	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,839	0,195	Valid
2	0,839	0,195	Valid

Sumber data : diolah dari kuisisioner

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel pendapatan (Y) yang diperoleh rata-rata lebih besar dari r-tabel dan seluruh instrument sebanyak 2 butir pertanyaan dikatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian kehandalan (reliabilitas) dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal antar variabel dalam instrumen. Melalui perhitungan dengan bantuan komputer diperoleh nilai Koefisien *Reliabilitas Alpha Cronbach* baik untuk variabel pendapatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan subsistem ketahanan pangan maupun dukungan lintas sektoral sebagai berikut :

Tabel 4.8. Koefisien Reliabilitas

No	VARIABEL	Koefisien Reliabilitas (Alpha)
1	Pemberdayaan Masyarakat ( $X_1$ )	0,987
2	Pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ )	0,970
3	Integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ )	0,943
4	Pendapatan (Y)	0,839

Sumber data : diolah dari kuisisioner

Hasil Koefisien Reliabilitas (Alpha) yang tertera pada tabel 4.8 dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan andal, artinya suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data atau mengukur obyek yang telah ditetapkan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$ .

## C. Temuan Penelitian

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan uraian tentang sebaran jawaban hasil penyebaran kuesioner sehingga dapat diketahui tanggapan responden terhadap butir-butir pertanyaan yang diajukan. Hasil pengolahan data sebagai berikut:

#### a. Tanggapan responden terhadap kuesioner pengaruh kegiatan pemberdayaan masyarakat program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

Pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dengan variasi tanggapan responden terhadap butir-butir pertanyaan yakni sebanyak 50,82% responden menyatakan berpengaruh, 20,07% menyatakan tidak berpengaruh, 16,39% menyatakan sangat berpengaruh, 7,90% menyatakan kurang berpengaruh serta 4,82% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Data ini menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan sebagian besar rumah tangga miskin.

Tanggapan responden untuk variabel pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dari tiga indikator yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.9  
Distribusi frekuensi tanggapan responden tentang pengaruh kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

No.	Indikator	Kategori skor										Jumlah	
		1		2		3		4		5		f	%
		F	%	F	%	f	%	f	%	f	%		
<b>A</b>	<b>Pendampingan</b>												
1	Pendamping dalam pengembangan dinamika kelompok afinitas	6	5,88	20	19,61	10	9,80	44	43,14	22	21,57	102	100
2	Pendamping dalam pengembangan LKD	4	3,92	21	20,59	7	6,86	55	53,92	15	14,71	102	100
3	Pendamping dalam pengembangan TPD	4	3,92	25	24,51	10	9,80	50	49,02	13	12,75	102	100
4	Pendamping dalam pengembangan usaha produktif kelompok	5	4,90	21	20,59	11	10,78	57	55,88	8	7,84	102	100
<b>B</b>	<b>Penguatan kelembagaan</b>												
5	Kelembagaan kelompok afinitas	5	4,90	20	19,61	14	13,73	46	45,10	17	16,67	102	100
6	Kelembagaan TPD	5	4,90	21	20,59	12	11,76	55	53,92	9	8,82	102	100
7	Kelembagaan LKD	6	5,88	9	8,83	1	0,98	62	60,78	14	13,37	102	100
<b>C</b>	<b>Pemanfaatan Dana Bantuan PUMK</b>												
8	Bantuan permodalan	6	5,88	19	18,63	2	1,96	47	46,08	28	27,45	102	100
9	Sistem simpan pinjam	4	3,92	21	20,59	11	10,78	49	48,04	17	16,67	102	100
10	Jumlah modal yang diberikan	4	3,92	19	18,63	4	3,92	53	51,96	22	21,57	102	100

Sumber data : diolah dari kuisioner

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa indikator yang paling dominan mempengaruhi variabel pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan rumah tangga miskin adalah indikator pemanfaatan dana bantuan PUMK. Indikator ini sangat dirasakan langsung oleh responden terkait dengan bantuan permodalan untuk usaha ekonomi produktif. Jumlah modal yang diterima responden dengan sistem simpan pinjam dalam kelompok membantu kesulitan permodalan yang dialami mereka dalam pengembangan usahanya. Selanjutnya syarat-syarat dalam pencairan dana tersebut dirasakan



responden sangat mudah salah satunya tanpa agunan (jaminan) dengan biaya jasa (bunga) yang tidak memberatkan (berdasarkan kesepakatan kelompok).

Tanggapan responden untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Indikator pendampingan

- a. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan pendamping dalam menumbuhkan, membina dan mengembangkan dinamika kelompok afinitas terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 43,14% menyatakan berpengaruh, 21,57% menyatakan sangat berpengaruh, 19,61% menyatakan tidak berpengaruh, 9,80% menyatakan kurang berpengaruh serta 5,88% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan pendamping dalam memperkuat dinamika kelompok berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- b. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan pendamping dalam mengembangkan layanan permodalan/lembaga keuangan desa (LKD) terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 53,92% menyatakan berpengaruh, 20,59 % menyatakan tidak berpengaruh, 14,71% menyatakan sangat berpengaruh, 14,71% menyatakan sangat berpengaruh serta 3,92% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan pendamping dalam

mengembangkan kelembagaan LKD berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

- c. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan pendamping dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan tim pangan desa (TPD) terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 49,02% menyatakan berpengaruh, 24,51% menyatakan tidak berpengaruh, 12,75% menyatakan sangat berpengaruh, 9,80% menyatakan kurang berpengaruh serta 3,92% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan pendamping dalam memperkuat kelembagaan tim pangan desa (TPD) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- d. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan pendamping dalam menumbuhkan, membina dan mengembangkan usaha produktif kelompok afinitas terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 55,88% menyatakan berpengaruh, 20,59% menyatakan tidak berpengaruh, 10,78% menyatakan kurang berpengaruh, 7,84% menyatakan sangat berpengaruh serta 4,90% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan pendamping dalam pengembangan usaha produktif kelompok afinitas berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

## 2. Indikator penguatan kelembagaan masyarakat

- a. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan kelembagaan kelompok afinitas terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 45,10% menyatakan berpengaruh, 19,61% menyatakan tidak berpengaruh, 16,67% menyatakan sangat berpengaruh, 13,73% menyatakan kurang berpengaruh serta 4,90% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan kelompok afinitas sebagai media interaksi anggota kelompok berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- b. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan kelembagaan tim pangan desa (TPD) terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 53,92% menyatakan berpengaruh, 20,59% menyatakan tidak berpengaruh, 11,76% menyatakan kurang berpengaruh, 8,82% menyatakan sangat berpengaruh serta 4,90% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan tim pangan desa (TPD) sebagai penggerak dan pengendali program desa mandiri pangan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- c. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan lembaga keuangan desa (LKD) terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 60,78% menyatakan berpengaruh, 18,63%



menyatakan tidak berpengaruh, 13,73% menyatakan sangat berpengaruh, 5,88% menyatakan sangat tidak berpengaruh serta 0,98% menyatakan kurang berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan lembaga keuangan desa (LKD) sebagai lembaga layanan permodalan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

3. Indikator pemanfaatan dana bantuan penguatan modal usaha kelompok (PUMK)

a. Tanggapan responden tentang pengaruh bantuan permodalan yang diberikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 46,08% menyatakan berpengaruh, 27,54% menyatakan sangat berpengaruh, 18,63% menyatakan tidak berpengaruh, 5,88% menyatakan sangat tidak berpengaruh serta 1,96% menyatakan kurang berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bantuan permodalan yang disalurkan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

b. Tanggapan responden tentang pengaruh pemanfaatan bantuan permodalan untuk simpan pinjam terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 48,04% menyatakan berpengaruh, 20,59% menyatakan tidak berpengaruh, 16,67% menyatakan sangat berpengaruh, 10,78% menyatakan kurang berpengaruh serta 3,92% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pemanfaatan bantuan permodalan untuk usaha simpan pinjam berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

- c. Tanggapan responden tentang pengaruh jumlah modal yang disalurkan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 51,96% menyatakan berpengaruh, 20,59% menyatakan tidak berpengaruh, 16,67% menyatakan sangat berpengaruh, 10,78% menyatakan kurang berpengaruh serta 3,92% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan jumlah modal yang disalurkan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- b. Tanggapan responden terhadap kuesioner pengaruh kegiatan pengembangan sistem ketahanan pangan program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

Pengaruh variabel pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dengan variasi tanggapan yakni sebanyak 46,08% responden menyatakan berpengaruh, 19,77% menyatakan kurang berpengaruh, 19,34% menyatakan tidak berpengaruh, 8,22% menyatakan sangat berpengaruh serta 6,59% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Tanggapan responden terhadap tiga indikator dalam variabel ini disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.10  
Distribusi frekuensi tanggapan responden tentang pengaruh kegiatan pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

No.	Indikator	Kategori skor										Jumlah	
		1		2		3		4		5		f	%
		F	%	F	%	f	%	F	%	F	%		
A	<b>Peningkatan produksi dan cadangan pangan</b>												
1	Insentif berproduksi	6	5,88	19	18,63	20	19,61	49	48,04	8	7,84	102	100
2	Lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat	10	9,80	22	21,57	21	20,59	42	41,18	7	6,86	102	100
B	<b>Kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli dan stabilitas pasokan</b>												
3	Penyediaan sarana prasarana distribusi pangan	6	5,88	19	18,63	9	8,82	58	56,86	10	9,80	102	100
4	Upaya mengurangi fluktuasi harga pangan	5	4,90	21	19,61	19	18,63	51	50,00	7	6,86	102	100
5	Pasokan pangan yang stabil dari luar desa	9	8,82	17	16,67	17	16,67	53	51,96	6	5,88	102	100
C	<b>Peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan</b>												
6	Kesadaran pola konsumsi pangan yang sehat	4	3,92	22	21,57	23	22,55	40	39,22	13	12,75	102	100
7	Pengembangan diversifikasi pangan	7	6,86	18	17,65	27	26,47	43	42,16	7	6,86	102	100

Sumber data : diolah dari kuisioner

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli dan jaminan stabilisasi pasokan sangat dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana distribusi seperti akses jalan, kendaraan angkutan dan adanya pasar terdekat dapat membantu responden dalam aktifitas usaha ekonominya yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Selanjutnya upaya mengurangi fluktuasi harga pangan (stabilisasi harga) dirasakan responden cukup membantu dalam meningkatkan akses pangan mereka sehingga berpengaruh terhadap kondisi usaha mereka dalam meningkatkan pendapatannya.

Tanggapan responden untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator peningkatan produksi dan cadangan pangan

- a. Tanggapan responden tentang pengaruh upaya peningkatan produksi usaha tani melalui insentif untuk berproduksi secara efisien dan perlindungan usaha tani terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 48,04% menyatakan berpengaruh, 19,61% menyatakan kurang berpengaruh, 18,63% menyatakan tidak berpengaruh, 7,84% menyatakan sangat berpengaruh serta 5,88% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan upaya peningkatan produksi usaha tani melalui insentif untuk berproduksi secara efisien dan perlindungan usaha tani berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
- b. Tanggapan responden tentang pengaruh keberadaan lumbung pangan atau cadangan pangan yang tersedia terhadap rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 41,18% menyatakan berpengaruh, 21,57% menyatakan tidak berpengaruh, 20,59% menyatakan kurang berpengaruh, 9,80% menyatakan sangat tidak berpengaruh serta 6,86% menyatakan sangat berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keberadaan lumbung pangan atau cadangan pangan yang tersedia berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.



2. Indikator kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli dan jaminan stabilitas pasokan
  - a. Tanggapan responden tentang pengaruh penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan seperti akses jalan, kendaraan angkutan dan adanya pasar terdekat terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 56,86% menyatakan berpengaruh, 18,63% menyatakan tidak berpengaruh, 9,80% menyatakan sangat berpengaruh, 8,82% menyatakan kurang berpengaruh serta 5,88% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
  - b. Tanggapan responden tentang pengaruh upaya mengurangi fluktuasi harga pangan terhadap rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 50,00% menyatakan berpengaruh, 19,61% menyatakan tidak berpengaruh, 18,63% menyatakan kurang berpengaruh, 6,86% menyatakan sangat berpengaruh serta 4,90% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan upaya mengurangi fluktuasi harga pangan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
  - c. Tanggapan responden tentang pengaruh pasokan pangan yang stabil dari luar desa terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 51,96% menyatakan berpengaruh, 16,67%

menyatakan kurang berpengaruh, 16,67% responden juga menyatakan tidak berpengaruh, 8,82% menyatakan sangat tidak berpengaruh serta 5,88% menyatakan sangat berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengaruh pasokan pangan yang stabil dari luar desa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

3. Indikator kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli dan jaminan stabilitas pasokan

a. Tanggapan responden tentang pengaruh penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat (beragam dan bergizi seimbang) terhadap peningkatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 39,22% menyatakan berpengaruh, 22,55% menyatakan kurang berpengaruh, 21,57% menyatakan tidak berpengaruh, 12,57% menyatakan sangat berpengaruh serta 3,92% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

b. Tanggapan responden tentang pengaruh upaya pengembangan diversifikasi pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 42,16% menyatakan berpengaruh, 26,47% menyatakan kurang berpengaruh, 17,65% menyatakan tidak berpengaruh, 6,86% menyatakan sangat berpengaruh serta 6,86% responden juga menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan

responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan upaya pengembangan diversifikasi pangan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

- c. Tanggapan responden terhadap kuesioner pengaruh kegiatan integrasi program lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

Pengaruh variabel pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dengan variasi tanggapan responden yakni sebanyak 46,08% responden menyatakan berpengaruh, 25 % menyatakan tidak berpengaruh, 14,22% menyatakan kurang berpengaruh, 9,56% menyatakan sangat berpengaruh serta 5,15% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Tanggapan responden terhadap dua indikator dalam variabel ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Distribusi frekuensi tanggapan responden tentang pengaruh variabel integrasi program lintas sektor terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

No.	Indikator	Kategori skor										Jumlah	
		1		2		3		4		5			
		F	%	F	%	f	%	F	%	f	%	f	%
<b>A</b>	<b>Perbaikan infrastruktur pedesaan</b>												
1	Perbaikan sarana dan prasarana umum	4	3,92	25	24,51	9	8,82	50	49,02	14	13,73	102	100
2	Perbaikan sarana dan prasarana khusus pertanian	5	4,90	26	25,49	14	13,73	47	46,08	10	9,80	102	100
<b>B</b>	<b>Integrasi program lintas sektoral</b>												
3	Dukungan program PNPM	5	4,90	25	24,51	10	9,80	54	52,94	8	7,84	102	100
4	Dukungan program pemberian Raskin	7	6,86	26	25,49	25	24,51	37	36,27	7	6,86	102	100

Sumber data : diolah dari kuisisioner



Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa dukungan program lintas sektoral seperti program PNPM sangat dominan dalam peningkatan pendapatan responden. Program PNPM seperti bantuan permodalan dan penyediaan infrastruktur pedesaan dapat mendukung peningkatan usaha ekonomi produktif rumah tangga miskin. Responden menyatakan bantuan PNPM ini dapat menambah permodalan untuk peningkatan kapasitas usahanya.

Tanggapan responden untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator perbaikan infrastruktur pedesaan
  - a. Tanggapan responden tentang pengaruh perbaikan sarana dan prasarana umum terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 49,02% menyatakan berpengaruh, 24,51% menyatakan tidak berpengaruh, 13,37% menyatakan sangat berpengaruh, 8,82% menyatakan kurang berpengaruh serta 3,92% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan perbaikan sarana dan prasarana umum berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
  - b. Tanggapan responden tentang pengaruh perbaikan sarana dan prasarana khusus seperti irigasi dan infrastruktur penyuluhan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 46,08% menyatakan berpengaruh, 25,49% menyatakan tidak berpengaruh,

13,73% menyatakan kurang berpengaruh, 9,80% menyatakan sangat berpengaruh serta 4,90% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan perbaikan sarana dan prasarana khusus dalam bidang pertanian berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

## 2. Indikator perbaikan infrastruktur pedesaan

a. Tanggapan responden tentang pengaruh dukungan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 52,94% menyatakan berpengaruh, 24,51% menyatakan tidak berpengaruh, 9,80% menyatakan kurang berpengaruh, 7,84% menyatakan sangat berpengaruh dan 4,90% menyatakan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dukungan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

b. Tanggapan responden tentang pengaruh dukungan program pemberian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) terhadap pendapatan rumah tangga miskin dapat diketahui sebanyak 36,27% menyatakan berpengaruh, 25,49% menyatakan tidak berpengaruh, 24,51% menyatakan kurang berpengaruh dan masing-masing 6,86% responden menyatakan sangat berpengaruh dan sangat tidak berpengaruh. Dari tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

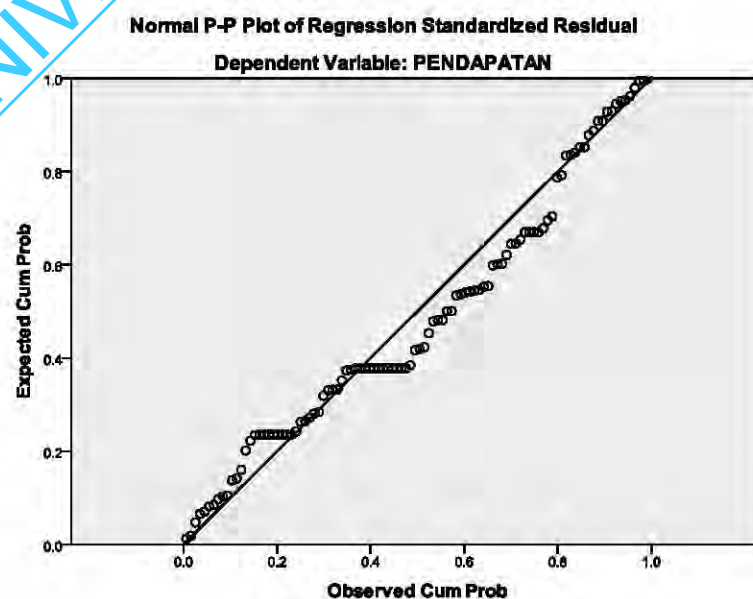
responden menyatakan dukungan program pemberian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

## 2. Analisis regresi

### a. Uji normalitas

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau yang mendekati normal. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Pengujian normalitas data, dilakukan dengan dua cara yaitu dibuat *histogram* untuk distribusi *standardized residual*, dan dibuat grafik *Normal Probability Plot* pada setiap model. Untuk memperoleh hasil yang akurat, penghitungan dilakukan dengan program SPSS Versi 17, hasilnya peneliti kemukakan sebagai berikut :

Gambar 4.12. Normalitas



Sumber data : Spss vers. 17



Gambar *Normal Probability* memperlihatkan bahwa sebaran data pada chart tersebut terdapat korelasi yang kuat antara *Expected Cumulative Probability* dengan *Observed Cumulative Probability*, sehingga memenuhi persyaratan normalitas.

#### b. Uji auto korelasi dan korelasi

Dari hasil perhitungan dengan program SPSS, pengaruh pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ), pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) dan integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ ) terhadap pendapatan ( $Y$ ) rumah tangga miskin diperoleh nilai statistik Durbin Watson sebesar 1,808, sesuai dengan kriteria bahwa apabila Durbin Watson-nya adalah  $-2$  sampai  $2$  tidak dijumpai adanya autokorelasi, maka dalam regresi ini autokorelasi tidak dijumpai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13. Model Summary<sup>b</sup>

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.889 <sup>a</sup>	.791	.784	.916	1.808

a. Predictors: (Constant), PEMBERDAYAAN\_MASYARAKAT, LINTAS\_SEKTOR, KETAHANAN\_PANGAN

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  
Sumber data : Spss vers. 17

### 3. Persamaan Regresi

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai persamaan regresi linear variabel bebas  $X$ , yaitu pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ), pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) dan integrasi program



lintas sektor ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikat yaitu nilai dari pendapatan ( $Y$ ). Persamaan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, termasuk pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan.

- a. Persamaan regresi pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ) terhadap pendapatan ( $Y$ )

Hasil pengolahan data melalui analisis regresi sederhana didapatkan nilai koefisien variabel sebagaimana dalam tabel 4.14 dibawah ini :

Tabel 4.14. Nilai Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-.005	.317		-.015	.988
Pemberdayaan Masyarakat	.163	.009	.885	19.006	.000

Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 17

Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = -0,005 + 0,163 X_1$$

Persamaan regresi ini dapat ditafsirkan sebagai berikut;

- 1) Intersep : -0,005 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ) maka pendapatan ( $Y$ ) rumah tangga miskin adalah -0,005 satuan.

- 2) Untuk pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ) : 0,163 artinya apabila variabel pemberdayaan masyarakat meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin sebesar 0,163 satuan.

Dari persamaan tersebut berarti pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan akan meningkat jika kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan. Sebaliknya pendapatan rumah tangga miskin ini menurun jika tidak dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh kegiatan pemberdayaan ini sangat besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Berdasarkan data di lapangan, beberapa indikator pemberdayaan masyarakat seperti pendampingan, penguatan kelembagaan dan pemanfaatan dana bantuan penguatan modal usaha kelompok (PUMK) berdampak langsung bagi pendapatan rumah tangga miskin. Sebanyak 50,49% responden menyatakan indikator pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Kemudian 53,26% responden juga menyatakan indikator penguatan kelembagaan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Selanjutnya 48,7% responden menilai bantuan penguatan modal usaha kelompok berpengaruh terhadap peningkatan pendapatannya.

**b. Persamaan regresi pengaruh variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) terhadap pendapatan (Y)**

Hasil pengolahan data melalui analisis regresi sederhana didapatkan nilai koefisien variabel sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.15. Nilai Koefisien

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.264	.356		.743	.459
Pengembangan ketahanan pangan	.239	.015	.850	16.150	.000

Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 17

Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 0,264 + 0,239 X_2$$

Persamaan regresi ini dapat ditafsirkan sebagai berikut;

- 1) Intersep : 0,264 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) maka pendapatan ( $Y$ ) rumah tangga miskin adalah 0,264 satuan.
- 2) Untuk pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) : 0,239 artinya apabila variabel pengembangan sistem ketahanan pangan meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin sebesar 0,239 satuan.

Dari persamaan tersebut berarti pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan akan meningkat jika kegiatan pengembangan sistem ketahanan pangan ditingkatkan. Dalam hal lain pendapatan rumah tangga miskin tetap ada kendatipun tanpa memerlukan kegiatan pengembangan sistem ketahanan pangan.

Berdasarkan data di lapangan, pengembangan sistem ketahanan pangan ini berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Hal ini tercermin dari tanggapan responden terhadap beberapa indikator yakni peningkatan produksi dan cadangan pangan, kemudahan akses fisik dan peningkatan daya beli serta stabilitas pasokan pangan, dan indikator peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Sebanyak 44,61% responden menilai upaya peningkatan produksi dan cadangan pangan berpengaruh terhadap pendapatannya. Kemudian 53,60% responden menyatakan adanya pengaruh positif kemudahan akses fisik dan peningkatan daya beli serta stabilitas pasokan pangan. Selanjutnya 40,69 responden menyatakan peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan berpengaruh terhadap pendapatannya.

**c. Persamaan regresi pengaruh variabel integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ ) terhadap pendapatan (Y)**

Hasil pengolahan data melalui analisis regresi sederhana didapatkan nilai koefisien variabel sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.16. Nilai Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.276	.363		.760	.449
Dukungan lintas sektoral	.415	.026	.845	15.787	.000

Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 17



Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 0,276 + 0,415 X_3$$

Persamaan regresi ini dapat ditafsirkan sebagai berikut;

- 1) Intersep : 0,276 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel pengembangan dukungan lintas sektoral ( $X_2$ ) maka pendapatan (Y) rumah tangga miskin adalah 0,276 satuan.
- 2) Untuk integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ ) : 0,415 artinya apabila variabel dukungan lintas sektoral meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin sebesar 0,415 satuan.

Dari persamaan tersebut berarti pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan akan meningkat jika kegiatan dukungan lintas sektoral ditingkatkan. Dalam hal lain pendapatan rumah tangga miskin tetap ada kendatipun tanpa memerlukan kegiatan dukungan lintas sektoral.

Data lapangan menunjukkan bahwa 2 indikator dalam variabel integrasi lintas sektor ini yakni perbaikan infrastruktur pedesaan dan dukungan program lintas sektor memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Sebanyak 47,55% responden memberikan pendapat bahwa perbaikan infrastruktur pedesaan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatannya. Kemudian 45,83% responden menyatakan dukungan program lintas sektor berpengaruh dalam peningkatan pendapatannya.



**d. Persamaan regresi pengaruh secara simultan variabel pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral terhadap pendapatan**

Nilai-nilai dari koefisien masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.17. Nilai Koefisien

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-.090	.320		-.282	.779
Pemberdayaan Masyarakat	.128	.023	.692	5.621	.000
Ketahanan pangan	.109	.102	.387	1.065	.290
Lintas sektor	-.087	.177	-.178	-.493	.623

Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 17

Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = -0,090 + 0,128 X_1 + 0,109 X_2 - 0,087 X_3$$

Interpretasi nilai intersep dan nilai koefisien dari masing-masing variable pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ), pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ), integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ ) dan pendapatan ( $Y$ ) dalam persamaan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Intersep : -0,090 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ), pengembangan sistem ketahanan

pangan ( $X_2$ ) dan variabel integrasi program lintas sektor ( $X_3$ ) maka pendapatan ( $Y$ ) rumah tangga miskin adalah -0,090 satuan.

- 2) Untuk pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ) : 0,128 artinya apabila variabel pemberdayaan masyarakat dinaikkan 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin sebesar 0,128 satuan.
- 3) Untuk pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) : 0,109 artinya apabila variabel pengembangan sistem ketahanan pangan dinaikkan 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan ( $Y$ ) rumah tangga miskin sebesar 0,109.
- 4) Untuk integrasi program lintas sektor ( $X_3$ ) : -0,087 artinya apabila variabel integrasi program lintas sektor dinaikkan 1 satuan maka akan mengurangi pendapatan ( $Y$ ) rumah tangga miskin sebesar -0,087.

Dari persamaan tersebut berarti pendapatan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program aksi desa mandiri pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat jika variabel pemberdayaan masyarakat ditingkatkan dan juga akan meningkatkan jika variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ditingkatkan. Namun demikian untuk variabel integrasi program lintas sektor yang dilaksanakan tidak akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga miskin. Secara keseluruhan hasil uji regresi tersebut menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Besarnya koefisien pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan masyarakat lebih besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan.

Hal ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat menjadi sentral dalam pelaksanaan program pemerintah dan menjadi jawaban dari apa yang disampaikan Kartasasmita (1995), pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok. Hal yang sama juga dalam panduan penanggulangan kemiskinan (2011) secara nasional maupun di tingkat daerah, memberdayakan kelompok masyarakat miskin menjadi satu diantara empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan.

#### **4. Pengujian Hipotesis**

Pengujian dilakukan terhadap masing-masing hipotesis. Adapun uji untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut :

##### **B. Uji F**

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesa, yaitu :

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



$H_1$  : terdapat pengaruh secara bersama-sama pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika nilai sign  $< 0,05$ , maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Tabel 4.18

Nilai F hitung variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ ), pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ ) dan integrasi program lintas sektoral ( $X_3$ ) terhadap pendapatan ( $Y$ )

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	310.174	3	103.391	123.296	.000 <sup>a</sup>
	Residual	82.179	98	.839		
	Total	392.353	101			

a. Predictors: (Constant), PEMBERDAYAAN\_MASYARAKAT, LINTAS\_SEKTOR, KETAHANAN\_PANGAN

b. Dependent Variable: PENDAPATAN

Sumber data : Spss vers. 17

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS Versi 17 diperoleh nilai signifikan 0,00 seperti terlihat pada tabel 21 dan nilai  $F_{hitung}$  123.296. Nilai kritis  $F_{tabel}$  dengan derajat bebas pembilang 3 dan penyebut 98 pada  $\alpha$  (0,05) sebesar 2,70. Dengan demikian keputusannya jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin program aksi desa mandiri pangan Provinsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### C. Uji t untuk Pemberdayaan Masyarakat

Uji t untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menguji hipotesa, yaitu :

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

$H_1$  : terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika nilai sign  $< 0,05$ , maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Tabel 4.19

Nilai t hitung variabel pemberdayaan masyarakat ( $X_1$ )

#### Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,005	0,317		-0,015	0,988
Pemberdayaan Masyarakat	0,163	0,009	0,885	19,006	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 17



Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 19,006 sedangkan  $t_{tabel}$  dengan derajat bebas 98 pada  $\alpha$  (0.05) sebesar 2,000. Dengan demikian  $t_{hitung}$  ( $19,006$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $2,000$ ), sehingga jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau jika melihat nilai sign sebesar 0,000. Dengan demikian keputusannya jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. Uji t untuk Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan**

Uji t untuk pengembangan sistem ketahanan pangan dilakukan untuk menguji hipotesa, yaitu :

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

$H_1$  : terdapat pengaruh pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika nilai sign  $<$  0,05, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Tabel 4.20.

Nilai t hitung variabel pengembangan sistem ketahanan pangan ( $X_2$ )

### Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,264	0,356		0,743	0,459
Pengembangan Ket. pangan	0,239	0,015	0,850	16,150	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 1

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 16,150 sedangkan  $t_{tabel}$  dengan derajat bebas 98 pada  $\alpha$  (0,05) sebesar 2,000. Dengan demikian  $t_{hitung}$  (16,150) >  $t_{tabel}$  (2,000), sehingga jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau jika melihat nilai sign sebesar 0,000. Dengan demikian keputusannya jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem ketahanan pangan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### E. Uji t untuk integrasi program lintas sektoral

Uji t untuk integrasi lintas sektor dilakukan untuk menguji hipotesa yaitu :

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh integrasi program lintas sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

$H_1$  : terdapat pengaruh integrasi program sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika nilai sign  $< 0,05$ , maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Tabel 4.21.  
Nilai t hitung variabel integrasi program lintas sektor ( $X_3$ )

**Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,279	0,363		0,760	0,449
Pengembangan Ket. pangan	0,415	0,026	0,845	15,787	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber data : Spss vers. 17

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 15,787 sedangkan  $t_{tabel}$  dengan derajat bebas 98 pada  $\alpha$  (0.05) sebesar 2,000. Dengan demikian  $t_{hitung}$  (15,787)  $>$   $t_{tabel}$  (2,000), sehingga jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau jika melihat nilai sign sebesar 0,000. Dengan demikian keputusannya jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi program lintas sektoral berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## 5. Koefisien Determinasi

Tabel 4.22. Model Summary<sup>b</sup>

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,889 <sup>a</sup>	0,791	0,784	0,916	1,808
a. Predictors: (Constant), Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ketahanan Pangan, Lintas Sektor					
b. Dependent Variable: Pendapatan					

Sumber :Data : Spss vers. 17

Terlihat dari tabel 25. bahwa nilai  $R = 0,889$  yang artinya hubungan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan lintas sektor secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan pendapatan. Dari tabel diatas diperoleh koefisien determinasi (r-square) sebesar 0,791. Nilai ini dapat didefinisikan bahwa 79,10% variabel pendapatan dapat dijelaskan oleh pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektor secara bersama-sama, sisanya 20,90% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini antara lain yaitu kemitraan dan sinergisitas program.

Berdasarkan pengolahan data kuisioner tentang informasi pendapatan responden sebelum dan peningkatannya sesudah dilaksanakannya program aksi desa mandiri pangan hasilnya mempertegas bahwa terdapat pengaruh ketiga variabel yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas

sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagian besar responden menyatakan meningkat pendapatannya (53%) dengan kisaran antara Rp. 500.000,- s/d > Rp. 3.000.000,- atau dengan rata-rata peningkatannya sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- .Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi pendapatan responden sebelum dan peningkatannya sesudah intervensi program.

Tabel 4.23. Variasi Pendapatan rumah tangga miskin

No	Pendapatan (Rp)	
	Sebelum	Peningkatan
1	200.000	<500.000
2	450.000	> 3.000.000
3	500.000	500.000 s/d 1.000.000
		1.000.000 s/d 2.000.000
4	600.000	500.000 s/d 1.000.000
		1.000.000 s/d 2.000.000
5	650.000	500.000 s/d 1.000.000
6	700.000	500.000 s/d 1.000.000
		1.000.00 s/d 2.000.000
		3.000.000
7	750.000	500.000 s/d 1.000.000
		1.000.000 s/d 2.000.000
8	800.000	1.00.000 s/d 2.000.000
9	900.000	> 3.000.000
10	970.000	1.00.000 s/d 2.000.000
11	1.000.000	500.000 s/d 1.000.000
		1.000.000 s/d 2.000.000
12	1.200.000	> 3.000.000
13	1.500.000	1.000.000 s/d 2.000.000
14	2.000.000	2.000.000 s/d 3.000.000

Sumber data : diolah dari kusioner



Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh :

1. Pemanfaatan dana penguatan modal digunakan untuk usaha ekonomi produktif seperti usaha dagang, usaha tani dan pengolahan hasil.
2. Peningkatan kesadaran dan kemampuan responden dalam pengelolaan usahanya.
3. Keinginan untuk berkelompok sebagai wadah interkasi anggota dalam pemecahan masalah dan pengembangan usahanya.
4. Peran pendampingan oleh pendamping/penyuluh dalam meningkatkan kemampuan anggota dalam pengelolaan usaha.
5. Peran pembinaan dari kelembagaan ketahanan pangan di desa seperti tim pangan desa (TPD) dalam pengembangan usaha kelompok.
6. Fungsi lembaga keuangan desa (LKD) sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan modal usaha anggota.

Kontribusi positif program aksi desa mandiri pangan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin sebagaimana hasil dalam penelitian ini memperkuat konsepsi teoritis hasil akhir kebijakan sebagaimana diungkapkan Wahab (2004) yakni akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian ini juga menegaskan pendapat Anderson (dalam Kismartini, 2010) tentang dampak kebijakan yang merupakan semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik langsung maupun yang akan datang. Bentuk manfaat

dalam penelitian ini adalah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin terhadap program aksi desa mandiri pangan.

Kaitannya dengan pendapat Kusumanegara (2010) tentang makna dampak kebijakan yang menyatakan dengan sebuah konsepsi akademik yang dimulai dengan pertanyaan : “apa yang terjadi dengan adanya suatu program?”, hasil penelitian ini memperkuat pernyataannya bahwa pengukuran ekonomi tentang dampak program digunakan untuk mengetahui keuntungan-keuntungan apa yang diraih oleh individu-individu. Setelah itu dampaknya terhadap masyarakat diukur dari agregasi (atau perkiraan efek agregasi) tingkat keuntungan yang didapatkan oleh individu-individu.

Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin ini memberikan dampak dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan program aksi desa mandiri pangan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga miskin. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sumodiningrat (1996) terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan secara tidak langsung konsepsi dampak kebijakan yang menurut Dunn (1995) merupakan perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficeries*). Perubahan pada tingkahlaku ini berhubungan dengan perilaku pengelolaan

usaha yang dilakukan oleh rumah tangga miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Hasil penelitian ini juga menegaskan dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) sebagaimana pendapat Anderson dalam Islamy (2009). Kebijakan mengenai memerangi kemiskinan misalnya maka sasaran yang dituju adalah masyarakat yang miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penelitian yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh variabel pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persamaan regresinya adalah  $Y = -0,005 + 0,163 X_1$  dengan nilai koefisien determinasi sebesar 78,30%.
2. Terdapat pengaruh variabel pengembangan sistem ketahanan pangan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persamaan regresinya adalah  $Y = 0,264 + 0,239 X_2$  dengan nilai koefisien determinasi sebesar 72,30%.
3. Terdapat pengaruh variabel integrasi program lintas sektoral terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persamaan regresinya adalah  $Y = 0,276 + 0,415 X_3$  dengan nilai koefisien determinasi sebesar 72,30%.
4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektoral

terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dalam program aksi desa mandiri pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persamaan regresi antar variabel adalah  $Y = -0,090 + 0,128 X_1 + 0,109 X_2 - 0,087 X_3$  dengan nilai koefisien determinasi sebesar 79,10%. Kendatipun variabel integrasi program lintas sektor tidak berpengaruh namun secara keseluruhan uji regresi tersebut menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

5. Pemberdayaan masyarakat merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin penerima manfaat program aksi desa mandiri pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat ditentukan seberapa jauh kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, demikian pula sebaliknya lemahnya pemberdayaan masyarakat akan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan rumah tangga miskin.

#### **b. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mendorong lebih maksimal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, penguatan kelembagaan dan peningkatan bantuan sosial (permodalan) sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin selaku penerima manfaat program aksi desa mandiri pangan.
2. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mendorong peningkatan peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)



khususnya dalam memperkuat dukungan program lintas sektoral dalam pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin.

3. Kelompok afinitas sebagai wadah organisasi rumah tangga miskin penerima manfaat program bersama kelembagaan lainnya (tim pangan desa/TPD dan lembaga keuangan desa/LKD) dapat meningkatkan peran dan fungsinya untuk mendorong usaha ekonomi produktif anggota kelompok dalam meningkatkan pendapatannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arsyad, L. (1992). *Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- AusAID. (2000). *Income Generation for the Rural Poor*. Canberra : National Capital Printers.
- Bechtold, Karl-Heinz. (1988). *Poilitik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Chambers, Robert. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta : LP3ES.
- Chalid, Pheni. (2010). *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: Univeritas Terbuka.
- Dunn, William N. (1995). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT.Hamindita.
- Ife, J.W. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives- vision, Analysiis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Islamy, M.Irfan. (2009). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Islamy, M.Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Kismartini,dkk. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mubyarto. (1998). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Mustopadidjaya, A.R. (1988). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta. Lembaga Admknistrasi Negara Republik Indonesia.

- Rahardja dan Manurung. (2008). *Pengantar Ilmu ekonomi (Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi) Edisi Ketiga*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rusli, Said. (1989). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta : LP3ES.
- Sudantoko dan Hamdani. (2009). *Dasar-dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta Selatan : PT. PP. Mardi Mulyo.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2000). *Statiska Untuk Penelitian*. Jakarta : CV. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1989). *Merode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Sutawan, N. (1998). *Politik Pertanian*. Denpasar : Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Todaro, Michael. P. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Wahab, S.A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. (2009). *Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2008*. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. (2008). *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 - 2009*, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2010). *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan*, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, (2008). *Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah*. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009). *Data Base Desa Mandiri Pangan Tahun 2006-2009*. Pangkalpinang.
- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2009). *Laporan Kegiatan Analisis Situasi Konsumsi, Penganekaragaman dan*

*Keamanan Pangan melalui kajian Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)*. Pangkalpinang.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2008). *Laporan Kegiatan Analisis Distribusi Pangan Tahun 2008*, Pangkalpinang.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2008). *Rencana Strategik (RENSTRA)*. Pangkalpinang.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2008). *Laporan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)*. Pangkalpinang.

### C. Media Massa

Bangka Post. (2012, 14 Juni). Pemda didesak Atasi Harga Karet.

Bangka Post. (2010, 26 September). Pendapatan Masyarakat Sudah Agak Berkurang.

### D. Website

Tribunnews.com. (2011, 2 Juli). Harga Timah Turun Pengaruhi Perekonomian Warga Babel.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/06/pengertian-pemberdayaanmasyarakat.html>

### E. Artikel

Bank Indonesia, (2011). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Palembang : Bank Indonesia.

Dardak, Hermanto. (2004). *Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.

Herawan, Endang (2007). *Teori Organisasi. Hand Out Materi Program Perkuliahan*. Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia.

- Hanani, Nuhfil. AR. (2010). *Pengertian Ketahanan Pangan*. Jawa Timur : Dewan Ketahanan Pangan.
- Kusumo, Ramli K.T. (2008). *Kajian dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Alor kecamatan Teluk Mutiara*. Jakarta : Tugas Akhir Program magister (TAPM) Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Power dan Empowerment; Sebuah Telah mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Pidato Kebudayaan Disampaikan Pada Peringatan Hari Jadi ke -28 Pusat Kesenian.
- Lubis, Dj. (2004). *Strategi penanggulangan kemiskinan nasional*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). *Panduan penanggulangan kemiskinan*. Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden.
- Pasandaran, E. (1994). *Hasil penelitian upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende dan Timor Tengah Utara*. Jakarta : Puslitbangnak.
- Satmoko, Bep Adji. (2005). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Integrasi Strategik untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Semarang : Tesis Universitas Diponegoro.
- Simatupang, Pantjar. (2007). *Analisis kritis terhadap paradigma dan kerangka dasar Kebijakan ketahanan pangan nasional*. Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Suwatri, Sri. (2011). *Jejaring Kebijakan Publik; Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan*. Semarang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro.
- Suryana, Achmad (2011). *Upaya mewujudkan pangan beragam, bergizi seimbang*. *Jurnal Dialog kebijakan Publik*. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Weningsih, Sri dkk. (1998). *Evaluasi Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Dampaknya terhadap pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Dati II Banyumas*. Jakarta : Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Terbuka.